

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, Sukarno menyebutkan jika Pancasila merupakan *Weltanschauung*¹ atau pandangan hidup bangsa yang akan dijadikan ideologi negara. Dalam pidatonya, Sukarno juga menegaskan bahwa *weltanschauung* harus dibulatkan di dalam hati dan pikiran setiap masyarakat sebelum datangnya kemerdekaan Indonesia. Pandangan hidup tersebut menjadi motor penggerak perjuangan, sehingga ketika tiba saatnya untuk merdeka, maka negara akan diletakkan di atas *weltanschauung* yang telah disusun sebelumnya.

Pancasila sebagai falsafah kenegaraan memiliki konsekuensi logis, yakni setiap warga negara dalam bertindak dan berperilaku harus terkandung jiwa Pancasila di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok dan fundamental bagi terselenggaranya sistem pemerintahan di Indonesia. Namun pada perjalanannya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut, baik dalam segi pemahaman maupun pengamalannya. Pancasila yang saat ini dipahami

¹*Weltanschauung* berasal dari bahasa Jerman yang artinya pandangan dunia. Bagus Lorens mengemukakan jika pandangan tentang dunia yang dimaksud menyangkut hakikat, nilai, dan hidup manusia sehingga *Weltanschauung* merupakan sistem prinsip-prinsip, pandangan-pandangan, dan keyakinan dapat menentukan kegiatan arah individu, sosial, atau masyarakat.



sebagai ideologi terbuka yang inklusif pernah berada pada situasi yang sulit dan cenderung tertutup. Bahkan, Pancasila digunakan sebagai alat propaganda dalam melanggengkan kekuasaan.

Salah satu periode krusial dalam pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dan dipandang eksklusif ialah masa Demokrasi Terpimpin. Periode ini dimulai sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi Terpimpin pada mulanya merupakan alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di kalangan elit politik Indonesia sepanjang 1950an. Sistem Demokrasi Liberal yang saat itu berjalan, diwarnai oleh konflik antar partai dan pemberontakan di berbagai daerah. Untuk menyelamatkan keutuhan dan perekonomian negara, maka Presiden Sukarno mengeluarkan suatu konsepsi baru dengan sistem yang lebih otoriter dimana ia menjadi pemeran utamanya. Sukarno dalam dekrit tersebut memutuskan untuk membubarkan Dewan Konstituante dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya itu, Sukarno juga membentuk Kabinet Kerja yang mengakomodasi golongan militer dan utusan partai-partai politik yang dekat dengannya. Keterlibatan militer dalam politik praktis menunjukkan bahwa pemerintahan yang berjalan tetap memerlukan topangan kuat dari angkatan bersenjata. Sukarno menyadari arti penting kekuatan militer yang posisinya bak pisau bermata dua, sewaktu-waktu dapat menguntungkan, namun juga dapat mengancam kedudukannya. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan kalangan militer, Sukarno membentuk organisasi dan kelompok-kelompok massa yang terdiri dari kalangan sipil yang kemudian berhasil didominasi oleh PKI.



Sukarno tampak mengambil langkah taktis dengan mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dalam satu wadah bernama Demokrasi Terpimpin, yang diikuti pula dengan klaim dirinya sebagai “Penyambung Lidah Rakyat”. Sukarno seolah menegaskan posisinya yang tidak pernah berjarak dengan rakyat. Hal ini bertujuan memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap tujuan nasional berupa penyelesaian revolusi dalam bingkai kebersamaan di bawah satu komando. Sukarno begitu mengharapkan seluruh warga negara memberikan dukungan kesetiaan penuh kepadanya.² Untuk mewujudkan obsesi tersebut, Sukarno kemudian mendirikan lembaga-lembaga baru seperti Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perancang Nasional yang anggotanya tidak dipilih melalui lembaga resmi atau struktur kepartaian, tetapi berdasarkan kedekatan pribadi dengan Sukarno atau orang-orang yang berasal dari kalangan militer.³

Kebijakan ini memicu kontroversi di berbagai kalangan. Sukarno kemudian menjawabnya dalam pidato kenegaraan pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 14 tanggal 17 Agustus 1959 berjudul *Penemuan Kembali Revolusi Kita*. Pidato ini sekaligus sebagai penjelasan dan pertanggungjawabannya mengenai Dekrit 5 Juli 1959 yang baru saja berlaku. Dalam pidatonya, Sukarno menyoroti jiwa kompromis yang mulai berkembang di Indonesia telah melahirkan penyelewengan terhadap cita-cita revolusi, sehingga rakyat Indonesia harus



arold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), 44.

rouch, *Militer dan Politik*, 45.

kembali ke rel revolusi dan bersama-sama menyelesaikannya.⁴ Oleh karena itu, sejak dekrit dikeluarkan, konsep revolusi belum selesai menjadi slogan dalam berbagai pidato untuk membakar semangat perjuangan rakyat. Sedangkan, pihak-pihak yang berseberangan, maka akan mendapatkan stigma sebagai musuh-musuh revolusi atau kaum kontra revolusioner.⁵

Pada awal tahun 1960, Dewan Pertimbangan Agung menetapkan pidato *Penemuan Kembali Revolusi Kita* menjadi manifesto politik (Manipol) yang disertai oleh lima prinsip dasar yakni UUD 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK) yang selanjutnya dikenal dengan Manipol USDEK. Nilai tawar Manipol USDEK terus meningkat, sebab dilegitimasi sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan dijadikan landasan dalam menetapkan peraturan resmi kenegaraan.⁶ Sayangnya, Manipol USDEK dinilai sebagai ortodoksi ideologi seorang pemimpin,

⁴ Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi Jilid II*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 3-4.

⁵ Musuh-musuh revolusi dalam pidato penemuan revolusi kita ialah “*golongan-golongan blandis, golongan-golongan reformis, golongan-golongan konservatif, golongan-golongan kontra revolusioner, golongan-golongan bunglon, golongan-golongan tjutjunguk*”. Dalam buku tujuh bahan pokok Indoktrinasi, pernyataan mengenai musuh-musuh revolusi Indonesia tersebut bermakna jika musuh-musuh revolusi Indonesia adalah kaum imperialis Belanda dan kaum imperialis lainnya yang bersikap antipath terhadap Republik serta pembantu-pembantu mereka.

⁶ Soeslan Abdulgani, *Pendjelasan MANIPOL Dan USDEK*, Departemen Penerangan RI, 1961), 7.



yang arti tepatnya tergantung pada Sukarno dan siapa yang mendukungnya karena tidak ada ruang untuk menerjemahkannya sendiri.⁷ Manipol USDEK selanjutnya diinternalisasikan ke seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat melalui program indoktrinasi, suatu program terstruktur yang secara kontinuitas memberikan pemahaman mendalam dan penggemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja, tanpa diberikan kesempatan untuk mengkritisnya. Manipol USDEK sebagai suatu konsepsi nasional dijalankan dengan pedoman yang sifatnya doktriner. Agar pokok-pokoknya dapat diresapi dan dipraktikkan oleh seluruh lapisan masyarakat, maka pemerintah memerintahkan indoktrinasi dilaksanakan secara menyeluruh, terutama pada daerah-daerah yang bergolak seperti di Sulawesi Selatan.

Pergolakan daerah di Sulawesi Selatan yang diakibatkan oleh pemberontakan Kahar Muzakkar dan gerakan Permesta membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Di bawah sistem Demokrasi Terpimpin, pemerintah tidak hanya menerjunkan operasi-operasi militer untuk melumpuhkan pergerakan fisik kaum pemberontak, akan tetapi juga melakukan pendekatan psikologis berupa restrukturisasi aparatur sipil dan militer untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Di samping itu, pemerintah pusat juga mengintensifkan upaya-upaya pemulihan mental bagi masyarakat setempat agar pembangunan dan tugas revolusi nasional dapat berjalan beriringan.



I.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, PT Serambi Ilmu Semesta, (2022), 552.

Langkah-langkah taktis yang dilakukan pemerintah dalam meredam pergolakan daerah di Sulawesi Selatan berdampak terhadap jalannya program indoktrinasi Manipol USDEK. Memasuki tahun 1960, wilayah Sulawesi Selatan perlahan-lahan dapat dikontrol oleh pusat. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan indoktrinasi Manipol USDEK mulai digalakkan. Pada awal tahun 1961 Panitia Pembina Djiwa Revolusi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara mengumumkan pembentukan tim indoktrinasi yang tersebar di beberapa wilayah Sulawesi Selatan.⁸ Selanjutnya, secara berkala diselenggarakan kursus indoktrinasi Manipol USDEK yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari para bupati, pegawai-pegawai negeri, pihak militer, partai politik, organisasi masyarakat, golongan karya, guru, tenaga pendidik, siswa, wartawan, hingga ke masyarakat umum.⁹

Indoktrinasi Manipol USDEK yang massif dilaksanakan di Sulawesi Selatan, membuat topik-topik terkait Manipol USDEK familiar di masyarakat. Sayembara Manipol USDEK yang dilaksanakan pada tahun 1963, menyedot animo yang tinggi dari masyarakat. Dalam waktu satu minggu, panitia penyelenggara telah menerima 6.000-12.000 jawaban.¹⁰ Sikap antusiasme ini

⁸ *Inventaris Arsip Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988* No. Reg. 744 Tentang "Nama-nama Calon Anggota Indoktrinasi Kotapradja Makassar 1961-1964", (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015).

⁹ *Inventaris Arsip Bantaeng 1866-1973 Vol. I* No. Reg. 1084 "Surat Menyurat BKDH Bantaeng mengenai Indoktrinasi Manipol USDEK Tahun 1962-1963", (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015).



Larian Marhaen, 18 November 1963.

menunjukkan hasil positif bagi tim indoktrinasi yang telah berkerja selama beberapa tahun. Terlebih lagi, sebagian kelompok mengaktualisasikan keberpihakannya terhadap Manipol USDEK dengan terlibat pada kompetisi manipolis. Dinamakan demikian, suasana Sulawesi Selatan saat itu dipenuhi oleh partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang seolah-olah berebut dan berkompetisi menonjolkan diri untuk disebut paling manipolis (paham dan mempraktikkan Manipol USDEK).¹¹ Setiap Presiden Sukarno selesai mengucapkan pidato atau selesai perayaan hari-hari besar, para pejabat, tokoh partai dan organisasi masyarakat segera menyatakan komitmennya berada dalam garis revolusi. Hal ini tentunya menjadi tolak ukur kesetiaan mereka terhadap gagasan-gagasan Presiden Sukarno dan menjadi ajang pembuktian pasca mengikuti program indoktrinasi. Kompetisi manipolis semakin semarak setelah mendapatkan saluran publikasinya melalui tiga surat kabar yakni Harian Marhaen, Tanah Air, dan Pedoman Rakyat.¹²

Pengaruh keberhasilan pelaksanaan indoktrinasi Manipol USDEK berdampak pada hubungan pemerintah pusat dan daerah Sulawesi Selatan yang cukup mesra di paruh awal tahun 1960 an. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Sukarno semakin gencar dilakukan, hingga pada salah satu pemberitaan di awal tahun 1965, disebutkan jika ajaran-ajaran Presiden/Pemimpin Revolusi Bung Karno telah diketahui oleh



lainuddin Taha, *Sulawesi Selatan Dari A. Achmad Rifai dan Lamo 1960-1970*, (Makassar: Badan Penerbit as Negeri Makassar, 2017), 53.

aha, *Sulawesi Selatan Dari*, 54.

masyarakat di pedalaman Sulawesi Selatan. Hampir di setiap rumah di pedalaman Sulawesi Selatan ada gambar Sukarno, meskipun dalam ukuran yang kecil. Berita ini menggembirakan pusat, sebab dalam waktu yang cukup lama masyarakat pedalaman Sulawesi Selatan tidak memperdulikan gagasan-gagasan Sukarno akibat pengaruh Kahar Muzakkar dan gerombolannya.¹³ Indoktrinasi Manipol USDEK hadir dalam proses pemulihan masyarakat Sulawesi Selatan dari trauma-trauma kekerasan fisik dan mental akibat pemberontakan. Kesan baik yang ditinggalkan tim indoktrinasi daerah dan militer yang kebersamai rakyat dalam proses rehabilitasi kampungnya semakin membuka mata masyarakat untuk mendukung pemerintah.

Keberhasilan indoktrinasi Manipol USDEK di Sulawesi Selatan merupakan wujud dari strategi hegemoni Presiden Sukarno. Negara mampu menancapkan otoritas politiknya kepada masyarakat Sulawesi Selatan dengan memadukan unsur koersif (paksaan) dan dukungan ideologis secara bersamaan. Hal ini tentu saja tidak sebatas kesuksesan propaganda negara, melainkan juga menjadi langkah awal konsensus dan rekonsiliasi hubungan antara pusat dan daerah yang sempat berjarak. Pada perkembangannya, pusat kemudian mengarah kepada pola dominasi atas daerah secara ideologis dan politik. Realitas yang terjadi di Sulawesi Selatan di bawah era Demokrasi Terpimpin ini sesuai dengan kerangka konseptual Gramsci yang menyatakan jika stabilitas politik tidak hanya bergantung pada represi militer,

ja pada keberhasilan negara dalam menginternalisasi ideologis ke dalam masyarakat. Dinamika politik dan



larian Marhaen, 28 Mei 1965.

pemerintahan di Sulawesi Selatan yang cukup kompleks menjadi tantangan pemerintah pusat untuk menundukkan daerah ini. Akan tetapi, persoalan tersebut tidak menghalangi pelaksanaan indoktrinasi Manipol USDEK hingga program ini disebut berhasil, membuat penulis tertarik untuk mengkajinya secara lebih mendalam.

1.2 Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini akan berfokus pada sejauh mana keberhasilan program indoktrinasi Manipol USDEK bagi masyarakat Sulawesi Selatan di tengah situasi pergulatan politik dan ideologi yang dinamis. Penelitian ini secara spesifik akan mengulas beberapa permasalahan yakni mengapa indoktrinasi Manipol USDEK di Sulawesi Selatan dapat menunjukkan keberhasilan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dilakukan telaah lebih lanjut tentang:

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam mensukseskan indoktrinasi Manipol USDEK di Sulawesi Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan indoktrinasi Manipol USDEK di Sulawesi Selatan?

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, peneliti memandang perlu untuk mencantumkan batasan-batasan, agar penelitian yang dilaksanakan menjadi lebih fokus dan terarah. Batasan tersebut terdiri atas batasan temporal dan spasial. Batasan temporal yakni kajian penelitian ini mengambil cakupan periode Demokrasi Terpimpin, yang dimulai



lainnya Dekrit 5 Juli 1959 dan menandai legalitas Manipol sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara. Tahun 1960 periode persiapan indoktrinasi dan pada tahun 1961-1962 ketika tim-tim indoktrinasi mengintensifkan indoktrinasi

Manipol USDEK, baik melalui kursus indoktrinasi maupun indoktrinasi massal.

Dampak Peristiwa Gerakan 30 September 1965 terhadap indoktrinasi Manipol USDEK di Sulawesi Selatan dibahas pada tahun 1965 sampai 1966, yang juga menjadi bagian akhir dari program indoktrinasi Manipol USDEK. Akan tetapi, untuk memperoleh gambaran yang komperhensif terhadap program indoktrinasi Manipol USDEK di Sulawesi Selatan, maka peneliti akan membahas mengenai kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia secara umum, dan Sulawesi Selatan secara khusus sebelum tahun 1959. Sedangkan batasan spasial secara garis besar akan mencakup wilayah Indonesia, namun kerangka yang lebih spesifik, penelitian ini akan memfokuskan objek kajiannya pada wilayah Sulawesi Selatan sebagai salah satu wilayah yang berhasil menyelenggarakan indoktrinasi Manipol USDEK di tengah kemelut daerah

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk melengkapi historiografi mengenai program indoktrinasi Manipol USDEK, khususnya pada bagian pelaksanaannya di daerah. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait strategi pemerintah dalam mensukseskan indoktrinasi Manipol-USDEK di Sulawesi Selatan. Agar ulasan tentang pelaksanaan indoktrinasi

am, maka peneliti juga akan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indoktrinasi Manipol di Sulawesi Selatan.



1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yakni memberi sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan terhadap konsepsi dasar negara yang diberlakukan selama masa Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Sukarno. Penulis juga mengharapkan, jika penelitian ini akan memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program indoktrinasi di Sulawesi Selatan, dengan memperhatikan aspek ideologis, sosial, politik dan kebudayaan masyarakatnya. Manfaat lainnya ialah menambah referensi tentang studi sejarah politik dan sosial, dengan melihat lebih jauh problematika dan dinamika sosial serta politik di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 1959-1966, dan tentunya menjadi bahan pembandingan bagi penulisan dengan tema yang serupa.

1.4 Tinjauan Pustaka

Satu bagian penting dalam penulisan ilmiah ialah tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menjelaskan secara umum beberapa referensi atau data yang bersumber dari tulisan orang lain. Langkah ini juga sekaligus menjadi ruang terhadap penulis dalam mengungkapkan perbedaan mendasar atas objek cakupan penelitiannya dengan karya lain sehingga menghindari adanya upaya penjiplakan. Telah terdapat beberapa tulisan terkait Manipol USDEK sebagai bagian dari kebijakan masa Demokrasi

Tersebut, akan tetapi proses internalisasi melalui indoktrinasi ini diulas khususnya yang dilaksanakan di daerah. Untuk menjawab pertanyaan dan mendukung hasil penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi terkait tema yang



dibahas, seperti tulisan berjudul *Sejarah Indonesia Modern (1200-2008)* karya M.C Ricklefs. Tulisan ini memaparkan rangkaian peristiwa bersejarah yang pernah dilalui bangsa Indonesia sejak kedatangan Islam hingga masa reformasi. Pada salah satu bab, M.C Riecklefs mengulas kondisi Indonesia di bawah masa Demokrasi Terpimpin, yang oleh penulis dijadikan sebagai referensi dalam memahami situasi politik, ekonomi dan sosial zaman itu. Akan tetapi, M.C Ricklefs memulai masa Demokrasi Terpimpin dengan mencantumkan angka tahun 1957, dimana konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin mulai disusun oleh Sukarno. Hal ini berbeda dengan penelitian ini, yang memulai uraian Demokrasi Terpimpin sejak dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959.

Tulisan selanjutnya yang menggambarkan situasi Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno ialah *Militer dan Politik di Indonesia*. Pada tulisan ini, Harold Crouch dengan tajam menjelaskan posisi militer dalam percaturan politik Indonesia. Menurutnya, sejak awal militer Indonesia berada dipersimpangan karena tidak pernah membatasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer, namun para tentara juga sewaktu-waktu menerima asas keunggulan kekuasaan sipil. Para tentara beranggapan bahwa peran mereka di tengah-tengah masyarakat sipil diperlukan dalam beberapa hal. Meskipun demikian, pihak militer tidak pernah betul-betul berada pada poros utama arena kekuasaan. Posisi yang dilematis ini selanjutnya mempengaruhi kebijakan politik Indonesia, terutama di masa Demokrasi



1 yang mencoba merangkul militer di satu sisi, namun antiasa berusaha mencari kekuatan penyeimbang di sisi 1. Melengkapi ulasan mengenai dinamika politik masa

Demokrasi Terpimpin, maka digunakan pula tulisan karya Herbert Feith berjudul *Sukarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Tulisan ini secara khusus menyinggung indoktrinasi Manipol USDEK dalam satu pembahasannya sebagai upaya Sukarno menginternalisasi ide-idenya kepada rakyat Indonesia. Presiden Sukarno melaksanakan kekuasaannya dan mengatur negara berdasarkan cara serta sudut pandangnya sendiri. Kedua tulisan tersebut umumnya menggambarkan hubungan militer dan Presiden Sukarno yang tarik-menarik kekuasaan. Sementara dalam tulisan tesis ini yang justru memperlihatkan keterlibatan militer dalam menjalankan program pemerintah pusat di daerah.

Berkaitan konsepsi pemikiran Sukarno tentang revolusi Indonesia, tulisannya yang berjudul *Panca Azimat Revolusi dan Di Bawah Bendera Revolusi* menjadi salah satu referensi utamanya. Tulisan ini merupakan kumpulan tulisan dan pidato Sukarno dari masa pra kemerdekaan hingga detik-detik ia meninggalkan tampuk kekuasaannya di tahun 1966. Sukarno mengungkapkan pandangannya tentang cara yang tepat untuk meraih dan mengisi kemerdekaan Indonesia, termasuk penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambilnya selama ia menjadi Presiden Indonesia. Terdapat pula beberapa tulisan dan pidato yang secara eksplisit menyinggung Manipol USDEK sebagai pedoman penyelenggaraan Demokrasi Terpimpin. Tidak berbeda jauh dengan buku sebelumnya, penerbit Prapantja Djakarta juga menelurkan sebuah tulisan berjudul *Dihadapan Tunas Bangsa* yang merupakan kumpulan pidato,

dan sambutan H. Roeslan Abdulgani. Tulisan ini secara persegmentasi pada dunia pendidikan yang menyasar as bangsa yakni generasi penerus, kaum terdidik, baik



siswa maupun mahasiswa. Melalui pidato dan sambutan tersebut, diharapkan menjadi sarana dalam mentransmisi pokok-pokok pikiran Sukarno melalui ruang tulisan. Selanjutnya, secara umum tulisan ini juga dapat digunakan oleh khalayak umum yang tengah berkecimpung dalam pembelajaran mental bangsa di tengah bergelornya revolusi Indonesia.

Potret kondisi politik dan pemerintahan Sulawesi Selatan dapat dilihat dari tulisan Sulawesi Selatan dari A. Achmad Rifa'i ke Achmad Lamo 1960-1970 karya Zainuddin Taha. Tulisan ini menceritakan dengan cukup detail mengenai proses penataan dan penyesuaian kembali lembaga pemerintahan di Sulawesi Selatan, setelah memasuki era Demokrasi Terpimpin. Pada salah satu bagiannya, terdapat ulasan mendalam tentang kompetisi manipolis yang dilakukan oleh partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang berlangsung sepanjang awal tahun 1960 hingga 1965 di Sulawesi Selatan. Ulasan ini menjadi bahan penting bagi penulis dalam melihat kondisi dan respon masyarakat Sulawesi Selatan terhadap program indoktrinasi Manipol USDEK. Dipaparkan pula mengenai kondisi sosial Sulawesi Selatan yang dipenuhi oleh pergulatan ideologi dan politik identitas.

Pembahasan serupa juga penulis dapatkan dari tulisan Kamp Pengasingan Moncongloe yang ditulis oleh Taufik Ahmad. Tulisan ini memotret keberadaan PKI di Sulawesi Selatan dan mampu melihat gejala-gejala sosial dan politik Sulawesi Selatan sebagai suatu fenomena yang unik serta memiliki akar dan historis yang panjang sebelumnya. Akan tetapi di sisi lain, kondisi secara lokal tersebut, juga dipengaruhi oleh kebijakan politik nasional, sehingga menuntun peneliti dalam



membangun perspektif yang lebih luas dalam memahami peristiwa daerah dan mengaitkannya dengan apa yang terjadi pada tingkat nasional.

Terkait analisa pergolakan daerah yang terjadi di Sulawesi Selatan, penulis menggunakan dua tulisan milik Barbara Sillars Harvey yang berjudul Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII dan PERMESTA Pemberontakan Setengah Hati. Kedua tulisan ini mengulas latar belakang pemberontakan di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menyangkut persoalan politik, namun juga menyangkut agama, budaya, penguasaan sumber-sumber ekonomi, ideologi dan sentimen kedaerahan yang berkembang pada saat itu. Demikian juga dengan tulisan PRRI Permesta Staregi Membangun Indonesia Tanpa Komunis karya RZ. Leirissa yang menyoroti tujuan utama dari gerakan ini sebagaiantisipasi dari semakin sulitnya PKI dibendung dalam menempati posisi-posisi strategis kekuasaan. Tulisan ini juga memaparkan perpecahan dalam PERMESTA yang mengakibatkan beralihnya pusat gerakan ke Sulawesi Utara dan penggabungannya dengan gerakan PRRI di Sumatera.

Berbagai referensi di atas pada dasarnya memberikan kontribusi yang besar sebagai pijakan dalam penulisan ini, akan tetapi pembahasannya belum lengkap dalam menggambarkan proses internalisasi ajaran Manipol USDEK ke masyarakat, sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi ulasan-ulasan yang luput dalam proses tersebut, terutama yang dilakukan melalui program indoktrinasi khususnya di Sulawesi Selatan.



embedakan penelitian sejarah dengan penelitian ilmu khususnya politik, maka metodologi yang digunakan an khas kesejarahan yang bertumpu pada konsep

pengulangan, perkembangan, kesinambungan dan perubahan. Syarat mutlak juga yang harus dihadirkan dalam penelitian ini ialah kredibilitas dan relevansi sumber yang terjamin.

1.5 Landasan Konseptual dan Pendekatan

Indoktrinasi secara harfiah dimaknai sebagai pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) atau penggemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja. Pada perspektif yang lebih politis, indoktrinasi merupakan proses sepihak yang dilakukan oleh penguasa dalam memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap oleh pihak penguasa sebagai suatu kebenaran yang ideal.

Proses indoktrinasi ideologi atau paham tersebut dapat ditempuh dengan dua metode yakni secara kasar atau halus. Indoktrinasi secara kasar dilakukan dengan memaksa seseorang, kelompok, masyarakat untuk ikut meyakini dan menjalani ideologi yang diinginkan pihak penguasa. Hal ini dapat terlihat pada negara-negara komunis yang cenderung memaksa rakyatnya melalui kekerasan fisik demi tersebarnya paham yang didoktrinkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula pihak yang melaksanakan indoktrinasi dengan cara halus seperti melalui ceramah, pidato, diskusi, dan pengajaran. Indoktrinasi bentuk ini didominasi dengan kegiatan pengajaran secara mendalam.

Jika pada awalnya indoktrinasi bersifat netral yang setara bentuk pengajaran yang mendidik, lambat laun ini berkonotasi sebagai pengajaran yang bersifat ideologis dan terpisah dengan konsep-konsep pendidikan yang



demokratis.¹⁴ Pada beberapa aspek, istilah ini digunakan untuk mengistilahkan aktivitas propaganda atau pencucian otak yang kemudian dianggap antitesis dari pendidikan untuk kehidupan yang membebaskan. Indoktrinasi mendorong seseorang untuk mengadopsi suatu keyakinan tanpa pemahaman yang tepat tentang dasar-dasarnya dan tidak adanya kesempatan untuk melakukan evaluasi. Baik indoktrinasi ataupun pendidikan edukatif, terlibat dalam mengajarkan suatu keyakinan tertentu. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada kesempatan untuk kritis. Pada pendidikan modern, pengembangan pemikiran kritis merupakan inti pengajaran yang mendidik, sedangkan indoktrinasi tidak menerima hal tersebut. Bahkan, David C McClelland seorang psikolog Amerika Serikat menggolongkan indoktrinasi sebagai pemalsuan pengajaran.¹⁵

Beberapa filsuf berpendapat lain dengan membedakan antara pendidikan dan indoktrinasi, berdasarkan isi pengajaran. Indoktrinasi yang berasal dari kata “doktrin” yang berarti sebuah kepercayaan yang jika tidak salah, setidaknya tidak diketahui kebenarannya. Alasan indoktrinasi harus digunakan dalam menginternalisasi suatu doktrin tertentu adalah karena doktrin tersebut tidak dapat dipertahankan dengan adanya sikap kritis. Jika diajarkan dengan tujuan untuk menghasilkan kepercayaan, maka doktrin-doktrin tersebut tidak akan diajarkan secara lentur dan terbuka. Indoktrinasi juga dirancang melalui suatu proses



apio Puolimatka, “The Concept of Indoctrination”, *Jurnal via Reformata* Volume 61 Nomor 2 Tahun 1996: 111.

puolimatka, “The Concept of,” 114.

sosial atau sistem nilai yang bertujuan untuk menanamkan suatu ide, konsepsi, kepercayaan, cara pandang, keyakinan dan perilaku tertentu. Oleh negara, proses ini sering digunakan sebagai sarana dalam menanamkan ideologi yang dianutnya.

Indoktrinasi umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang dinilai lebih dominan atau berkuasa atas golongan lainnya yang menerima indoktrinasi, sehingga dianggap sebagai bagian dari proses hegemoni penguasa. Terkait hal tersebut, Antonio Gramsci mengidentifikasi proses hegemoni yang terjadi tidak hanya dilaksanakan melalui sikap koersif atau kekerasan, namun juga secara persuasif dengan mengedepankan suatu konsensus antar berbagai pihak. Konsensus atau kesepakatan bersama ini kemudian menghasilkan ketertundukan. Kelompok kelas yang berhasil menghegemoni oleh Gramsci diasumsikan telah mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas lainnya, dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis.¹⁶

Antonio Gramsci mendeskripsikan relasi antara negara dan masyarakat dengan menyebutkan jika basis dari supremasi suatu kelas tercipta dengan dua ciri yakni sebagai dominasi dan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral. Kelompok sosial yang ingin berstatus penguasa, terlebih dahulu harus mendominasi dan mengalahkan pihak oposisi. Setelah itu terjadi, maka kelompok tersebut akan menjadi hegemoni dan memiliki kekuasaan atas pemerintahan. Di sisi lain, Presiden Sukarno juga harus



Endah Siswati, "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci", *Jurnal Translitera* Volume 5 (Maret 2017): 23.

membangun kepemimpinan moral dan intelektual dengan tujuan mengkonsolidasikan kekuasaan negara melalui kelompok loyalis yang mendukung ideologi yang dicetuskannya, tidak semata-mata pada kekuatan militer. Gramsci menegaskan bahwa kekuasaan yang stabil tidak hanya bertumpu pada dominasi yang bersifat paksaan (*coercion*), tetapi juga hegemoni, yaitu penerimaan sukarela masyarakat terhadap penguasa atau negara melalui pembenaran ideologis. Tidak berhenti sampai disitu saja, hegemoni ini harus tetap dijaga. Pihak dominan atau penguasa dapat menempuh berbagai upaya agar kekuasaannya tetap langgeng dan tidak tergembosi oleh pihak oposisi. Hegemoni kekuasaan harus terus dipertahankan, walaupun harus menempuh kompromi. Kompromi diperlukan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial yang terus berubah serta sebagai bentuk respon dari pihak oposisi dan kaum intelektual yang merongrong kekuasaan.

Sebagai suatu konsepsi nasional, Manipol USDEK dijadikan medium hegemoni Presiden Sukarno. Manipol USDEK sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara. Atas dasar tersebut, Manipol USDEK mampu bertransformasi dari gagasan pribadi Sukarno, menjadi falsafah hidup berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Demi membangkitkan partisipasi masyarakat dalam konsepsi tersebut, maka Manipol USDEK dibangun di atas narasi revolusi Indonesia yang belum selesai dan menjadi pekerjaan bersama seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikannya.

Agar pemahaman terhadap Manipol USDEK tidak melenceng, dipahami dengan benar sesuai keinginan penguasa dan n oleh masyarakat, maka pemerintah melaksanakannya ara indoktrinasi.



Indoktrinasi Manipol USDEK dilakukan melalui pendidikan dan organisasi massa dengan corong utamanya pers dan lembaga pemerintah. Indoktrinasi menjadi cara ampuh dalam merebut hegemoni. Hegemoni dengan jalan persuasif dan tanpa kekerasan ini ditempuh demi melanggengkan kekuasaan Presiden Sukarno, sebab menurut Gramsci, suatu kelas tidak dapat meraih kepemimpinan nasional dan menjadi hegemonik, jika kelas itu hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka harus juga memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat yang tidak mempunyai karakter kelas yang bersifat murni, yaitu kepentingan yang tidak muncul secara langsung dari hubungan-hubungan produksi sehingga hegemoni mempunyai dimensi kelas dan dimensi nasional kerakyatan.¹⁷

Gramsci berpendapat jika konsensus negara dibangun oleh aparatur negara dalam artian yang lebih luas. Tidak terbatas pada aparatur negara yang bersifat represif yang berkaitan dengan syarat-syarat praktik hukum seperti polisi, pengadilan, penjara, dan tentara (militer). Akan tetapi mencakup sejumlah institusi tertentu dari masyarakat sipil yakni pendidikan, agama, organisasi massa dan media massa. Senada dengan hal tersebut, Louis Althusser menjelaskan negara memiliki dua alat utama: *Repressive State Apparatus* (RSA) seperti militer dan polisi, serta *Ideological State Apparatus* (ISA) seperti sekolah, agama, media, dan keluarga. ISA membentuk kepatuhan masyarakat lewat



siswati, "Anatomi Teori Hegemoni, " 16.

pendidikan dan budaya, bukan sekadar represi.¹⁸ Indoktrinasi Manipol USDEK jelas menunjukkan peran ISA, dimana kursus Manipol USDEK dilaksanakan di sekolah, melalui ceramah agama dari Departemen Agama, kegiatan kemasyarakatan dan media massa. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa indoktrinasi bukan sebatas propaganda, tetapi proses internalisasi ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif Foucault juga menyoroti bagaimana kekuasaan tersebar di berbagai praktik sosial dan institusi yang dekat dengan masyarakat, bukan hanya pada ranah yang besar di pusat. indoktrinasi Manipol USDEK melalui kursus-kursus yang dilakukan secara intensif dan mekanisme laporan birokrasi, pada akhirnya membentuk disiplin dan pengawasan. Masyarakat dan aparaturnegara dibuat menyesuaikan perilaku mereka terhadap Manipol USDEK tanpa adanya paksaan langsung.¹⁹ Realitas tersebut mencerminkan pengaruh kekuasaan mikro yang menormalisasi ideologi negara di tingkat akar rumput.

1.6 Sumber Penulisan dan Metode Penelitian

Tulisan ini akan meliputi pelaksanaan program Indoktrinasi Manipol USDEK di Sulawesi Selatan pada Tahun 1959-1966. Pertarungan ideologi dan upaya pengontrolan penguasa selama periode Demokrasi, khususnya pada daerah-daerah yang dirundung konflik terus-menerus seperti yang terjadi di Sulawesi

¹⁸ Louis Althusser, *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (catatan Investigasi)* (Jakarta: IndoPROGRESS, 2015),



Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of* New York: United States by Random House Inc, 1995),

Selatan. Oleh karena itu dalam kajian ini akan digunakan metode historis yang didukung oleh konsep dan teori ilmu-ilmu bantu. Dalam merekonstruksi peristiwa tersebut, ditempuh dengan prosedur sistematis dimulai dari heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber baik secara internal maupun eksternal, interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan kembali).

Langkah pertama yakni heuristik yang dalam hal ini penulis mengumpulkan sumber data dan informasi yang relevan. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku-buku, artikel, arsip, dan surat kabar sezaman yang relevan dengan objek kajian. Buku Tujuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan Agung merupakan salah satu sumber primer yang menjadi pedoman pelaksanaan indoktrinasi. Bahan indoktrinasi meliputi pidato lahirnya Pancasila, UUD 1945 beserta penjelasannya, Manifesto Politik beserta perinciannya dari DPA, Pidato Presiden yang berjudul Djalannya Revolusi Kita, Penjelasan Manipol dan USDEK, serta Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana. Untuk mengetahui konsep Manipol USDEK secara terperinci, peneliti mencoba menelaah buku Pendjelasan Manipol Dan USDEK yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan RI. Buku ini ditulis oleh H. Roeslan Abdulgani selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan Ketua Pembina Djiwa Revolusi. Buku ini memuat latar belakang, inti ajaran, dan cara pelaksanaan konsep Manipol USDEK yang harus dijalankan dan diresapi secara jujur serta sadar oleh seluruh rakyat Indonesias.



ak kalah penting dari sumber di atas, penelitian ini juga arsip sebagai sumber primer terutama yang bertujuan menggambarkan penyelenggaraan indoktrinasi Manipol

USDEK di Sulawesi Selatan. Penulis mengumpulkan arsip dari Inventaris Arsip Tekstual Dr. H. Roeslan Abdulgani yang diperoleh dari Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya, penulis juga menggunakan Inventaris Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara 1960-1964 Volume II, Inventaris Arsip Bantaeng 1866-1973 Volume I, Inventaris Arsip Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988 dan beberapa arsip lainnya. Arsip-arsip tersebut berisi data mengenai pelaksanaan indoktrinasi Manipol-USDEK, baik melalui kursus yang diadakan tim-tim indoktrinasi untuk pegawai pemerintah, kelompok militer, anggota organisasi masyarakat dan masyarakat umum. Arsip-arsip ini juga memuat nama-nama pihak yang terlibat langsung dalam indoktrinasi baik sebagai pemateri maupun peserta. Selain itu, juga dilengkapi dengan jadwal kegiatan dan bahan tes/ soal ujian di akhir pelaksanaan indoktrinasi Manipol USDEK.

Untuk melihat dinamika dan respon masyarakat Sulawesi Selatan terhadap program indoktrinasi Manipol-USDEK, maka peneliti akan menelaah koran sezaman. Surat kabar yang dimaksud ialah Harian Marhaen, Tanah Air dan Pedoman Rakyat, yang banyak dijadikan medium indoktrinasi pemerintah, sekaligus wadah masyarakat Sulawesi Selatan dalam menuangkan pemikiran dan pandangan politiknya terhadap berbagai fenomena yang tengah terjadi. Surat kabar ini juga menjadi sumber penting bagi penulis dalam memahami problematika sosial dan politik yang tengah terjadi di Sulawesi Selatan selama periode Demokrasi Terpimpin.



ama proses pengumpulan sumber, penulis harus kan data yang diperoleh kredibel. Olehnya itu, dilakukan kedua yakni kritik sumber internal dan eksternal. Pada

bagian kritik eksternal, peneliti menguji keabsahan fisik dari sumber data yang diperoleh. Kritik eksternal yang peneliti lakukan berfokus pada bahan dari sumber yang diperoleh. Pertanyaan mengenai bahan pembuatan sumber dan keaslian bentuk sumber serta kapan sumber itu diterbitkan menjadi standar utama dalam proses ini. Sedangkan kritik internal dilakukan untuk menjawab hal-hal yang terkait dengan substansi atau nilai-nilai kebenaran dari suatu sumber dengan cara membandingkan dengan sumber lainnya. Secara khusus, penelitian ini juga akan menganalisis lebih dalam terkait buku-buku indoktrinasi Manipol-USDEK keluaran pemerintah, yang cenderung bersifat doktriner. Kritik internal juga peneliti lakukan pada objektivitas surat kabar yang memuat berita indoktrinasi Manipol USDEK di Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan agar interpretasi data yang disajikan lebih kritis.

Setelah memastikan keakuratan data, langkah terakhir ialah penulisan sejarah. Fakta-fakta yang telah dikumpulkan melalui arsip, buku, dan surat kabar kemudian ditelaah secara mendalam dan dimaknai oleh peneliti, untuk menjelaskan sebab dan akibat yang menjadi permasalahan penelitian. Selanjutnya, hasil telaah tersebut dideskripsikan secara sistematis dan kritis. Pada tahap ini, subjektivitas mulai muncul karena adanya imajinasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menafsirkan data-data yang tersedia. Untuk mengeliminasi subjektivitas tersebut, peneliti harus tetap berada di bawah metodologi sejarah.

1.7 Sistematika Penulisan



san ini terbagi ke dalam lima bab. Bab pertama berisi uan yang terdiri atas ulasan latar belakang dan rumusan yang menjadi fokus penelitian ini. Selain itu, terdapat an dan manfaat yang menjelaskan alasan-alasan

pelaksanaan dan tujuan yang diharapkan dari hadirnya penelitian. Berikutnya, tinjauan pustaka dihadirkan sebagai upaya peneliti memaparkan refensi dan bahan pendukung dari penelitian sebelumnya. Sementara kerangka teori dan konseptual digunakan untuk mendudukkan penelitian yang dilakukan dari berbagai sudut pandang, sekaligus berfungsi untuk mengarahkan dan menguatkan argumentasi yang dihasilkan. Terakhir yakni metode dan sistematika penulisan, demi mempertegas kajian historis dari penelitian ini.

Bab kedua menggambarkan dinamika politik dan pemerintahan Sulawesi Selatan Pasca Kemerdekaan. Pada bab ini, diulas tiga poin penting yakni dualisme pandangan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap sistem pemerintahan Indonesia yang terdikotomi menjadi kelompok republikan dan federalis, pergolakan politik daerah, dan penyelenggaraan pemilu 1955 yang berdampak pada jalannya pelaksanaan program indoktrinasi Manipol USDEK di masa Demokrasi Terpimpin.

Bab ketiga memuat konsep dasar dari pokok-pokok Manipol USDEK dan persiapan indoktrinasi di Sulawesi Selatan. Secara lebih terperinci, akan fokus terhadap latar belakang munculnya gagasan dan inti ajaran dari Manipol USDEK, kebijakan *retooling* sebagai strategi awal implementasi Manipol USDEK, pembentukan tim indoktrinasi di Sulawesi Selatan, serta bahan-bahan pokok yang digunakan selama indoktrinasi Manipol USDEK berlangsung.

Bab keempat membahas tentang pelaksanaan indoktrinasi USDEK di Sulawesi Selatan, khususnya tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan indoktrinasi, um indoktrinasi yang digunakan.



Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan yang mengungkapkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya.



BAB II

DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN SULAWESI SELATAN PASCA KEMERDEKAAN

Struktur pemerintahan di Sulawesi Selatan mendapatkan pengaruh besar dari karakteristik dan budaya masyarakat setempat yang telah mengakar sejak lama. Peran bangsawan terlihat dominan, setidaknya hingga beberapa dekade pasca kemerdekaan Indonesia. Anggapan ini seolah tervalidasi oleh sikap pemimpin politik terkemuka Sulawesi Selatan di awal kemerdekaan, yang tidak mengesampingkan kaum bangsawan sebagai salah satu elemen utama dalam mengamankan posisi Provinsi Sulawesi di Republik Indonesia. Dr. Sam Ratulangi yang merupakan Gubernur pertama Sulawesi, mengirimkan utasan untuk menemui para raja dan kepala adat guna meminta dukungan dalam memperkuat kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Atas dasar ini, para bangsawan Sulawesi Selatan bertransformasi menjadi pihak yang sangat kuat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan kemudian berada dalam garis kaum republikan, ketika Sulawesi Selatan berada di bawah pemerintahan Negara Indonesia Timur. Akan tetapi Belanda tidak menyerah, mereka kemudian mempengaruhi raja-raja (bangsawan) yang belum berpihak pada kaum republikan dengan mengangkatnya menjadi Dewan Penasehat Sulawesi Selatan. Dewan ini berfungsi untuk

kan nasehat, dan sewaktu -waktu jika diperlukan dapat



bertransformasi menjadi suatu badan pemerintahan yang sah.¹ Demikian juga dengan para anggota parlemen NIT yang pertama terbentuk. Lembaga perwakilan tersebut lebih banyak mengakomodasi kepentingan para raja-raja lokal yang memiliki kekuasaan turun temurun.²

Belanda dapat dikatakan berhasil memperkuat kedudukannya di Sulawesi Selatan atas bantuan dan sokongan pasukan sekutu. Apalagi, setelah sukses menjalin hubungan mesra dengan tokoh-tokoh politik, raja-raja dan bangsawan yang kontra republik. Oleh karena itu, Sulawesi Selatan menjadi daerah yang tidak berhenti mengalami berbagai pertentangan dari segi ideologi, politik, dan pemerintahan dalam kurun waktu yang lama.

Pada bab ini akan di bahas beberapa poin penting diantaranya, pergulatan antara kaum republikan dan federalis, pergolakan daerah Sulawesi Selatan, dan kontestasi politik pada pemilu tahun 1955. Ketiga poin tersebut menggambarkan dinamika politik dan pemerintahan yang mempengaruhi pasang surutnya hubungan Sulawesi Selatan dengan pemerintah pusat. Realitas ini menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan strategi pelaksanaan indoktrinasi Manipol USDEK di Sulawesi Selatan.

¹ Muhammad Amir dan Bahtiar, *Sejarah Sulawesi Selatan: Integrasi Kerajaan ke NKRI*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2021),



Am Daeng Makkelo, "Penataan Kota dan Masyarakat di Makassar Sebagai Ibukota Negara Indonesia Timur 1946-1950", *SASDAYA, Gadj Mada Journal of Humanites*, Vol. 1, No. 1, (November 2017): 319.

2.1. Pergulatan antara Kaum Republikan dan Kaum Federalis.

Perbincangan terkait federalisme bukanlah hal baru bagi tokoh politik Indonesia. Sejak tahun 1930an, wacana Indonesia terdiri atas daerah-daerah otonom menjadi perbincangan hangat. Dalam beberapa pokok pemikiran Moh. Hatta dan Sjahrir terlihat jelas hal tersebut. Menurut Sjahrir, glorifikasi terhadap sikap persatuan akan mengurangi nilai demokrasi itu sendiri serta meredupkan pemikiran politik kritis masyarakat.³ Sementara memberikan kesempatan kepada seluruh pihak berekspresi dan mengembangkan potensinya masing-masing, akan melahirkan dinamika yang sehat di tengah masyarakat. Pasca kemerdekaan, pandangan ini juga dilirik oleh tokoh-tokoh yang ada di daerah. Najamuddin Daeng Malewa, seorang tokoh pergerakan asal Sulawesi Selatan telah memiliki visi federalisme sejak bertugas di Jawa dengan mendirikan Roepelin (Rukun Pelayaran Rakyat) yang berfungsi sebagai wadah perkumpulan nelayan asal Bugis-Makassar di Surabaya, dan di kemudian hari menjadi pemimpin Negara Indonesia Timur. Begitupula dengan Dr. Sam Ratulangi yang memandang bahwa negara serikat merupakan bentuk alamiah dari karakteristik geografis dan sosial masyarakat Indonesia, namun ia bersikap lebih realistis setelah melihat besarnya pengaruh Sukarno yang unitaris dalam proses penataan negara Indonesia, dan mulai menyadari jika pemerintahan yang diusulkan oleh Belanda merupakan tipu muslihat.



Najamuddin, "Pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) Sulawesi Selatan (1946-1950)". *Jurnal Sejarah Indonesia*, No. 1, (Januari 2011): 85.

Belanda tidak hanya memilih kekerasan sebagai jalan menguasai kembali Indonesia, namun juga masuk kepada ranah psikis. Belanda memanfaatkan celah perbedaan ideologi, keberagaman budaya dan suku, serta kepentingan politik yang masih belum benar-benar selesai di tengah masyarakat, terutama di kalangan petinggi negeri. Pilihan bentuk negara kesatuan atau federal dijadikan senjata untuk memperuncing perbedaan yang telah ada sebelumnya. Besarnya pengaruh pro republik membuat Belanda merasa terancam dan memikirkan berbagai cara untuk menangkalnya. Belanda mengupayakan adanya hubungan baru dengan pihak lawan. Meskipun demikian, Belanda tidak akan beranjak dari tujuan utamanya, yakni melanggengkan sistem kolonialisme. Di pihak Indonesia, Kabinet Syahrir kedua melalui jalur diplomasinya, mendesak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan menolak wacana masa peralihan. Salah satu klausulnya ialah penarikan Angkatan perang Belanda di seluruh wilayah Indonesia. Bagi sebagian petinggi Belanda termasuk Letnan Gubernur Jendral Dr. H.J. van Mook, usulan tersebut telah jauh menyimpang dari usul-usul Belanda, sehingga perundingan tersebut mengalami stagnasi. Untuk memecah kebuntuan, Van Mook mengusulkan suatu sistem pemerintahan dengan desain baru. Terinspirasi dari hubungan yang dibangun oleh Prancis atas Vietnam setelah perang kemerdekaan. Prancis memang mengakui kemerdekaan Vietnam, namun di saat yang bersamaan juga membentuk Federasi Indocina yang menjadi negara bagian dari Prancis sebagai negara induknya. Skema ini



juga oleh keinginan Belanda untuk membentuk negara-negara bekas jajahannya sebelum Perang , seperti halnya negara persemakmuran. Dengan

demikian, Van Mook mengusulkan adanya negara Federal Indonesia yang menjadi negara bagian dari Negara Indonesia Serikat, yang terikat di dalam satu uni Kerajaan Belanda.⁴

Indonesia bagian timur dipilih sebagai wilayah pertama yang dijadikan prototipe negara federal, karena di wilayah inilah kekuatan militer Belanda terhitung mempunyai baik dari segi jumlah maupun loyalitas. Mulai dari daerah Minahasa di Sulawesi hingga Ambon di Maluku, tercatat menjadi pusat pengerahan tenaga yang utama bagi KNIL. Di samping itu, ketertarikan atas gagasan negara federal memang lebih dominan pada kawasan luar Jawa. Pemerintah pusat dinilai tidak mampu mengakomodasi seluruh kepentingan daerah secara bersamaan dan merata. Dengan basis militer yang telah diperhitungkan dan memanfaatkan gejolak daerah, maka Belanda memilih untuk memusatkan pemerintahan negara federalnya di tengah-tengah wilayah timur Indonesia yakni Sulawesi Selatan.

Negara federal buatan Belanda dibuka dengan penyelenggaraan Konferensi Malino yang semula direncanakan berlangsung pada tanggal 15-25 juli 1946, namun baru dapat terlaksana pada tanggal 8 dan 9 Oktober 1946. Mundurnya konferensi tersebut mengindikasikan gencarnya penolakan pihak republikan terhadap kembalinya Belanda dalam urusan administrasi dan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Konferensi Malino dihadiri perwakilan dari berbagai daerah seperti Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara,



⁴ e Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur Republik Indonesia Serikat* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1985), 31.

Sulawesi Tengah, Sangir dan Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua, Tanimbar dan Aru, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor. Belanda menyasar wilayah Indonesia Timur yang dijadikan benteng pertahanan, sekaligus batu loncatan untuk menguasai kembali seluruh wilayah dan pemerintahan Indonesia.

Tamu undangan yang datang di konferensi Malino dengan total 39 perwakilan dari 15 daerah jelas tidaklah sembarangan. Belanda menetapkan syarat yang cukup ketat terhadap siapa yang hadir di Malino. Setidaknya mereka harus pro kepada Belanda dan sepakat dengan adanya negara serikat bentukan Van Mook. Persiapan dimulai dengan menangkap Dr. Sam Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi yang republikan. Hal ini juga dilakukan kepada beberapa pimpinan wilayah lainnya seperti Gubernur Kalimantan dan Sunda Kecil.⁵ Kemudian masyarakat diminta untuk memilih calon perwakilan setiap daerah yang akan hadir pada Konferensi Malino. Kewenangan yang diberikan oleh Belanda tidak membuat masyarakat puas, sebab calon yang disediakan mayoritas orang-orang yang kooperatif dengan Belanda atau walaupun yang terpilih calon yang anti Belanda, maka akan dibatalkan, sehingga proses pemilihan tersebut dinilai tidak mampu membawa suara masyarakat yang pro republik. Semakin memanas, ketika pemilihan dilaksanakan dengan intimidatif, bendera merah putih dilarang berkibar dan pembatasan pemutaran Lagu Indonesia Raya.



.H Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1996), 508.

Agen politik yang dalam hal ini adalah para perwakilan daerah memiliki orientasi politik yang berbeda pula. Bagi kaum aristokrat lama yang cenderung pragmatis dan belum terpapar nilai penting kemerdekaan bagi suatu negara, tawaran sebagai pemimpin negara federal cukup menggiurkan. Terlebih jika wilayah tersebut memang masih kental terhadap unsur-unsur feodal yang konservatif. Semakin diperkuat oleh golongan politik yang merasa tidak terwadahi kepentingannya selama proses pembentukan struktur administrasi baru di daerah pasca kemerdekaan Indonesia.⁶

Konferensi Malino melahirkan konstruksi negara baru yakni federasi. Dengan bentuk ini, sudah terbaca jika negara federal hanya dijadikan boneka Belanda, bukan bagian dari agenda reformasi politik sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh tokoh politik lokal saat itu. Akan tetapi, hal ini tidak dipersoalkan, karena juga memberikan keuntungan bagi wilayah-wilayah yang bergabung dalam memenuhi kepentingannya. Belanda mencoba membuat sistem yang terlihat adil dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam. Kesempatan ini

⁶ Najamuddin Daeng Malewa merupakan salah satu tokoh politik yang berpengaruh di Sulawesi Selatan. Ia pernah menjadi anggota partai Parindra dan memiliki pengaruh yang besar pada sarekat-sarekat buruh angkutan perahu. Akan tetapi, Najamuddin Daeng Malewa tidak termasuk sebagai delegasi Sulawesi Selatan yang menghadiri siding PPKI di Jakarta tanggal 19 Agustus 1954, sehingga tidak mendapatkan posisi strategis. Ketika Provinsi Sulawesi terbentuk. Atas hal ini, Najamuddin Daeng Malewa merasa cewa yang berpengaruh pada sikap politiknya. Secara umum, pada bulan Oktober 1945 Najamuddin Daeng mengumumkan bekerjasama dengan pihak NICA yang telah tokoh-tokoh politik Sulawesi Selatan lainnya yang ia dikenal mendukung terbentuknya negara federal.



dimanfaatkan oleh beberapa kelompok untuk menghapus sistem sentralistik dan menawarkan otonomi daerah. Daerah dinilai termarginalkan oleh kepentingan pusat, sehingga tuntutan agar daerah diberikan wewenang dalam mengelola sumber dayanya sendiri sering disuarakan oleh tokoh-tokoh lokal.

Belanda menjajikan desentralisasi pada setiap daerah otonom. Sesuatu yang diinginkan oleh segolongan kelompok masyarakat. Prakarsa Van Mook untuk membentuk tatanan sistem pemerintahan Federal kemudian berlanjut dengan pertemuan serupa di Denpasar, Bali. Lokasi konferensi dipindahkan karena pertimbangan keamanan di Sulawesi Selatan yang tidak kondusif.⁷ Meskipun demikian, pertentangan tersebut tidak menghalangi niat Belanda untuk mewujudkan keinginannya. Konferensi Denpasar yang berlangsung pada tanggal 24 Desember 1946 memutuskan secara resmi membentuk Negara Indonesia Timur dengan Makassar sebagai ibukotanya. Hadirnya NIT di Sulawesi Selatan selanjutnya menambah pekatnya konflik masyarakat di satu sisi, namun juga menjadi bensin terhadap menyalanya api semangat perlawanan di sisi lainnya.

Wilayah NIT meliputi seluruh Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya. Konferensi Denpasar menetapkan Tjokorde Ode Gake Sukawati seorang bangsawan Bali sebagai Presiden NIT, sementara Najamuddin Daeng Malewa bertugas sebagai Perdana Menteri yang merangkap Menteri Urusan Perekonomian dan Mr. Tadjoeuddin Noer sebagai ketua parlemen.⁸



asution. *Sekitar Perang Kemerdekaan*, 510.

asution. *Sekitar Perang Kemerdekaan*, 511.

Merka dilantik di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1947. Sementara itu, anggota parlemen NIT berasal dari para delegasi yang menghadiri Konferensi Denpasar, ditambah dengan sepuluh anggota yang ditunjuk langsung oleh Belanda dan mulai bersidang pada tanggal 22 April 1947 di Makassar.⁹ Dalam perkembangan selanjutnya, parlemen NIT diisi oleh dua fraksi yakni Fraksi Pembangunan dan Fraksi Progressif.¹⁰

NIT yang tampak meyakinkan dari luar, ternyata rapuh di dalam. Penyebab konflik internal dapat ditelusuri dari latar belakang para pejabat terasnya. Mr. Tajoeeddin Noer yang sempat diajukan sebagai calon pemimpin NIT, sebenarnya seorang nasionalis yang bersimpati terhadap republik bersama dengan Dr. Sam Ratulangi sejak 1944. Para pendukung Mr. Tajoeeddin Noer yang kalah pada pemilihan calon ketua NIT, terkristalisasi menjadi pihak oposisi di pemerintahan negara federal yang baru ini. Kelompok anggota parlemen tersebut menamai dirinya dengan Fraksi Progressif. Sementara untuk membendungkannya, para anggota parlemen yang mendukung Sukawati juga membentuk satu kelompok yang disebut Fraksi Pembangunan. Persaingan kedua fraksi ini kemudian memunculkan pihak penengah yang dikenal sebagai Fraksi Nasional.

Adanya kenyataan bahwa parlemen NIT diisi oleh simpatisan republik membuat suhu politik memanaskan. Tarik menarik penengaruh semakin akrab dirasakan hingga pada

⁹ Amir dan Bahtiar, *Sejarah Sulawesi Selatan*, 109.



Amr Firdaus Mutawally. "Negara Indonesia Timur: dari hingga Integrasi dalam Republik Indonesia (1946-*Jurnal CC-By Attribution 4.0 International* Volume 1 2021): 6.

tanggal 27 Mei 1947, Mr. Taajoeddin Noer harus meletakkan jabatannya sebagai ketua parlemen karena adanya mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh para anggota parlemen pro Pemerintah yang dipimpin oleh Dg. Mattayang.¹¹ Setali tiga uang dengan Najamuddin Daeng Malewa yang juga diberhentikan dari jabatan Perdana Menteri sejak tanggal 17 September 1947. Penggantinya yakni Dr. S.J Warow juga harus bernasib sama setelah dua bulan menjabat. Ia tumbang karena tidak mendapatkan dukungan dari Fraksi Progressif di parlemen.

Gelombang protes terhadap terbentuknya Negara Indonesia Timur mulai mengemuka. Beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Kalimantan, Bali, dan Lombok melakukan agitasi dan gerakan perlawanan. Bagi Sulawesi Selatan sendiri selaku tempat konferensi, aksi penolakan jelas terjadi. Sikap reaktif diperlihatkan oleh hasil konferensi Persyarikatan Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang dengan tegas berikrar untuk memihak pemerintah Republik Indonesia, saat konferensi Malino masih berlangsung.¹² Setelahnya, antipati berujung kerusuhan dan serangan terhadap kediaman inspektur kolonial dan pejabat lokal anti republik semakin meningkat. Tiga wilayah yang menjadi pusat serangan yakni Makassar, Gowa dan Pare-Pare.

¹¹ Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Pemerintah Propinsi ngkat I Sulawesi Selatan, 1991), 271.



Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi* (Indonesia: Kementerian Penerangan, 1953), 161.

Upaya pembungkaman kaum anti federalis dilakukan Belanda dengan mengeluarkan kebijakan pembekuan PNI sebagai partai republikan yang paling vokal dalam menolak negara federasi. Belanda secara sepihak menutup kantor, sekolah, hingga menangkap petinggi PNI, sehingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran khususnya di kota Makassar.¹³ Dua belas partai politik bersama dengan organisasi kemasyarakatan yang diwadahi oleh GAPKI (Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia) mempertegas posisi rakyat Sulawesi Selatan dalam pertarungan dualisme sistem kenegaraan tersebut. Atas dasar mewakili aspirasi rakyat, mereka mendesak dibubarkannya NIT dan Sulawesi Selatan kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia. Jalan yang sama juga ditempuh oleh Lanto Daeng Pasewang sebagai ketua Fraksi Kesatuan Parelemen NIT yang juga menginginkan peleburan NIT ke dalam Republik Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949 melahirkan pemerintahan Republik Indonesia Serikat. NIT kemudian dileburkan ke dalam pemerintahan baru ini. Dengan demikian, seluruh wilayah NIT, khususnya Sulawesi kembali menjadi sebuah unit administratif pemerintahan sipil dan menjadi satu provinsi yang berpusat di Makassar.

Peleburan NIT ke dalam RIS tidak serta merta melegakan. NIT tetap tidak mendapat tempat di hati rakyat Sulawesi Selatan. Dikotomi antara golongan republikan dan federalis terus terjadi.



Bambang Purwanto, Gerry van Klinken, dkk, *Dunia Perspektif dan Dinamika Lokal Pada Masa Perang kaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor a, 2023), 207.

Masyarakat mulai menyebarkan plakat-plakat dan selebaran-selebaran yang berisi propaganda terhadap keberadaan kaum federalis. Pada tanggal 25 Januari 1950, polisi Agen Lankoke melaporkan telah menerima selebaran plakat yang diletakkan pada tembok kantor pos di Jalan Gouverneurslaan. Isinya ajakan kepada kaum buruh untuk bersatu dan melakukan pemogokan secara serentak, sebagai bentuk tuntutan terhadap kemerdekaan Indonesia yang sejati. Plakat yang sama juga ditemukan pada papan reklame di jalan Hogeoad no. 15 depan kantor Drukkery Makassar.

Pada papan reklame Pasar Butung dan Pasar Baru terpasang pula poster yang memakai gambar orang dengan satu tangannya memegang pedang dan tangan sebelahnya memegang bendera merah putih yang disampingnya tertulis "BASMILAH SIFAT PENDJDJAHAN".¹⁴ Khusus di Pasar Baru, poster propaganda juga nampak terlihat dari gambar yang diduga P.J.M Presiden N.I.T sedang menunggangi orang Indonesia yang memakai songkok, dan disampingnya tertulis "SUKAWATI INGIN NAIK KUDA, TETAPI RAKJAT JANG MENDERITA", atau selebaran plakat yang ditemukan tertempel di depan Masjid Raya yang berisi "DJANGAN PERTAHANKAN N.I.T BERANI PERTAHANKAN N.I.T DJIWA MELAJANG". Plakat propaganda semacam ini acap kali ditemukan di Kota Makassar sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat. Mereka yang membuat agitasi ini, berasal dari rakyat biasa yang tidak menyukai adanya NIT. Penyebaran plakat ini terus berlangsung dalam kurun waktu



nventaris Arsip NIT 1946-1950 No. Reg. 153 Tentang -laporan Penyebaran plakat-plakat anti NIT", (Makassar: sip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015).

yang lama. Agitasi melalui selebaran juga dilancarkan oleh Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Pamflet propaganda ditemukan di tiang telephon di Goaweg, Merdekajaweg dan Pattunuangweg. Pamflet yang sama juga ditemukan di Pasar Kalimbu dan di Gedung Alhambra Theater dan depan toko-toko. Beberapa pamflet diantaranya ditujukan khusus kepada polisi.¹⁵

CHUSUS UNTUK SDR2 POLISI!!!

1. Jang memperalat sdr2 sekarang, bukanlah Pemerintah RIS, tetapi segelintir ketjil tuan2 besar di kalangan tuan2, turut Belanda2 jg duduk dibelakang kursi djadi penasehat, dengan maksud kedudukan tuan2 itu “dapat teguh dibelakang senapang jg sdr pegang”.
2. Insapi bahwa diperalat dengan kesadaran sampai patuh melaksanakan perintah jg bertentangan dengan djiwa, dengan kemanusiaan, itu adalah perbuatan “tedong”, ditjotjok hidung hanja karena takut tidak dapat lagi hidup” Timbang2 sdr2.
3. Perhitungan kepada tuan2 besar di kalangan sdr2, hampir tiba.
4. Azis jang mengganggu kemanan umum, sdr2 tidak sikat. Anggota kami jg masuk kota untuk menjerang tangsi mereka sdr2 halangi dengan tembakan2. Mana keadilan polisi? Apa sebab sampai demikian? Sebab tuan2 besar



Inventory Arsip NIT 1946-1950 No. Reg. 153 “Tentang laporan Penyebaran plakat-plakat anti NIT”, (Makassar: sip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015).

itu hanya ingin membersihkan pihak kami supaya “kursinja” tetap didapatnja. Mengerti Bung?

5. Usahakanlah supaya sdr2 djangan membinasakan kawan kami. Berikanlah pertolongan, bila benar2 sdr Polisi Bangsa Indonesia.
6. Kami akan mengadakan atas pekerdjaan sdr-sdr,
7. Selesai.-

Akumulasi aksi politik menuntut pembubaran NIT selanjutnya direalisasikan dalam perlawanan fisik. Pertama-tama, dengan melakukan demonstrasi besar yang berhasil menarik sebanyak 20.000 masyarakat Kota Makassar untuk turun ke jalan, mendesak pembubaran NIT di tanggal 17 Maret 1950. Bak domino, aksi demonstrasi dan rapat konsolidasi menyebar dengan cepat ke daerah lain di Sulawesi, seperti Gorontalo dan Donggala. Beberapa hari kemudian, dilaporkan adanya upaya penyerangan pos polisi Tinambung, Afdeling Mandar oleh anggota Tengkorak Putih yang berjumlah 3.000 orang. Namun hal ini dapat segera dicegah setelah Maraddia Tinambung menjadi penengahnya. Meskipun penyerangan tidak terjadi, tetapi mereka tetap menuntut agar pos polisi di Tinambung dipindahkan ke ibu kota Madjene dan raja-raja harus berpendirian kepada Negara Kesatuan, menggabungkan diri pada Republik Indonesia. Melihat situasi yang tidak kondusif ini, Asisten residen Madjene meminta kepada Kepala Polisi Negara Daerah Selebes Selatan yang ada di Makassar segera mengirim bantuan polisi ke Madjene, sebab polisi di Afdeling Mandar tidak cukup mengatasi di daerah tersebut.



egangan politik dan keamanan tersebut membuat NIT mendesak pemerintah pusat untuk memasukkan

KNIL ke dalam APRIS. Tentara KNIL yang saat itu berada di Sulawesi Selatan berjumlah sekitar 1500 orang yang terbagi ke dalam 2 batlyon.¹⁶ Usulan tersebut tidak dipenuhi seluruhnya, hanya 1 batlyon pimpinan Andi Azis yang diakomodasi masuk APRIS dan diterjunkan untuk menertibkan situasi. Langkah ini tentu saja mengecewakan kelompok kelaskaran yang telah lama menanti kejelasan status mereka pada struktur ketentaraan Indonesia. Pada Konferensi Patjekke tahun 1947, Panglima Besar Sudirman melantik Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS)¹⁷ sebagai satuan TRI-PS, sehingga para anggota kelaskaran mengusulkan kepada pemerintah RI untuk diberikan pengakuan sebagai TNI Divisi Hasanuddin di bawah Komando Kahar Muzakkar. Akan tetapi, usulan itu belum juga direalisasikan hingga bergabungnya KNIL dan penetapan Andi Azis sebagai pemimpin APRIS pada tanggal 30 Maret 1950. Hanya sekitar 300 orang bekas gerilyawan yang diterima menjadi anggota TNI/APRIS dan mendapatkan pelatihan di depot militer Pandang-Pandang, Gowa.¹⁸ Jumlah ini tentunya dirasa tidak adil jika melihat perjuangan mereka selama masa revolusi dalam mempertahankan tegaknya kemerdekaan Indonesia. Tidak sebanding dengan KNIL yang pro Belanda dan telah

¹⁶ Bahtiar, Ansaar, Sritimuryati, "Peristiwa Andi Azis di Sulawesi Selatan 5 April 1950", *Seminar Series in Humanities and Social Science*, Volume 1 No.1, 2019, 2.

¹⁷ Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) merupakan satuan yang menjadi wadah pasukan gerilya Sulawesi Selatan di bawah Komando Kahar Muzakkar.

¹⁸ Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari 1948 ke 1950*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989),



membunuh rakyat Indonesia tanpa belas kasih. Pusat berdalih, masuknya KNIL dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan kekuatan di setiap daerah, antara anggota APRIS yang berasal dari TNI dan KNIL. Terlebih untuk Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu wilayah konsentrasi terbesar pasukan KNIL.

Konfrontasi antara KNIL dan KGSS semakin hari tidak dapat terbendung. Hamengkubuwono IX selaku Menteri Pertahanan RIS menginstruksikan Mayor H.V. Worang mengomandoi APRIS untuk segera mengamankan kota Makassar. NIT menolak dan mencoba meyakinkan pusat jika situasi akan segera kondusif kembali cukup dengan tentara KNIL yang ada. NIT khawatir jika keberadaan APRIS akan semakin menyudutkan posisi federalis dan menaikkan daya juang pendukung unitaris. Sebagai langkah preventif, Andi Azis atas bujukan Soumokil mantan Menteri Kehakiman NIT melancarkan serangan ke barak-barak Corps Polisi Militer (CPM) dan markas Staf TNI sekitar 05.00 pagi di tanggal 5 April 1950, sesaat sebelum pasukan APRIS tiba di Kota Makassar.

Serbuan Andi Azis selama beberapa waktu mampu melumpuhkan TNI, bahkan menahan Letkol Mokoginta dan stafnya serta mengultimatum agar batlyon pimpinan Worang harus kembali ke Jakarta. Kota Makassar untuk sesaat berada di bawah kuasa Andi Azis, meskipun demikian aksi ini terpatalkan tatkala mulai menganeksasi depot militer Pandang-pandang Gowa. Untuk mengendalikan situasi genting tersebut, pihak RIS



menggelar rapat dengan militer Belanda di Jakarta dan menahan Andi Azis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak sampai disitu, para petinggi NIT juga dipanggil

ke Jakarta untuk melaporkan kondisi Sulawesi Selatan. Pihak NIT menegaskan jika tidak terkait langsung dengan tindakan tersebut, meskipun secara khusus Andi Azis memberikan pernyataan bahwa tindakannya sebagai anggota APRIS bertujuan untuk mempertahankan legitimasi NIT. Oleh Panglima APRIS pada tanggal 13 April 1950, Andi Azis didakwa telah melanggar hukum negara dan mencederai nama baik kesatuan sehingga dinyatakan sebagai pemberontak.¹⁹

Tindakan sepihak Andi Azis pada dasarnya semakin menegaskan polarisasi yang terjadi dalam konstruksi negara RIS. Golongan federal tidak pernah rela melebur bersama republikan. Ambisi federalis tersebut dipahami oleh Hatta sebagai Perdana Menteri RIS saat itu. Dalam pidatonya yang disiarkan melalui radio, ia menyatakan jika pertentangan paham yang terjadi antara keduanya hendaknya diperjuangkan secara sportif, dilandaskan pada rasa saling menghargai, karena seluruh masyarakat Indonesia terikat akan persaudaraan setanah air. Aspirasi politik yang berseberangan tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan granat. Keputusan akhir dari sistem hendaknya diserahkan ke tangan rakyat sendiri sebagai hakim yang akan menentukan perjalanan bangsa kedepannya.

Pidato yang disampaikan Hatta nyatanya tidak mampu meredam gejolak yang terlanjur membara. Begitupun dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Andi Azis, tidak membuat KNIL mengendorkan perlawanan. Mereka melakukan agitasi dengan menurunkan bendera merah putih di tangsi militernya saat



3ardosono, *Peristiwa Sulawesi Selatan 1950*, (Jakarta: Pustaka Militer, 1956), 16.

Presiden Sukarno mengunjungi Makassar. KNIL juga mencoret tembok rumah rakyat dan memasang spanduk yang menyudutkan pemerintahan RIS. Tidak ketinggalan pula, KNIL memprovokasi rakyat untuk menyerang pos-pos APRIS, hingga puncaknya pada tanggal 15 Mei 1950 terjadi bentrokan besar antara KNIL dan APRIS yang didukung oleh anggota kelasakara Lipang Bajeng dan Palangga yang bergerak dari Polong bangkeng dan Pallangga.²⁰ Rakyat turut membantu APRIS dengan memboikot seluruh kegiatan perdagangan terhadap markas-markas KNIL. Di tengah suasana yang masih memanas, serdadu bentukan Belanda ini sekali lagi berjudi dengan nasibnya. Pada tanggal 05 Agustus 1950, KNIL mengingkari pokok-pokok kesepakatan yang telah disetujui bersama oleh tiga unsur terkait yakni APRIS, UNCI dan tentara Belanda.²¹ Atas kejadian ini, APRIS, pejuang kalaskara dan rakyat bersatu melancarkan serangan balasan yang berujung pada pengusiran KL (pasukan bekas KNIL) dari kota Makassar. Ketiga peristiwa di atas merupakan titik kulminasi dari friksi politik kaum federalis dan republikan yang merambah ke ranah keamanan dan kemiliteran. Kondisi keamanan dan politik yang tidak stabil di Sulawesi Selatan turut memengaruhi perekonomian rakyat. Tiga puluh persen

²⁰ Bustan Buhari. "Pergolakan Andi Azis di Makassar". *E-Journal Tebar Science Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, Volume (September 2017): 39.



Jeny Aditian dan Kuswono, "Upaya Penyelesaian Konflik NIL dengan APRIS di Sulawesi Selatan tahun 1947-1950". *Jurnal Swarnadwipa* Volume 1, No.1, (2017): 25.

infrastruktur Kota Makassar rusak parah sehingga kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah.²²

Dalam suasana penuh ketegangan di Sulawesi Selatan, pemerintah pusat mulai menyiapkan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara intensif. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, diproklamirkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus pembubaran NIT dan negara bagian lainnya yang tergabung dalam RIS. Peristiwa ini juga menandai kemenangan kaum republikan dalam pergolakan politik yang terjadi sejak pasca kemerdekaan di Sulawesi Selatan. Rakyat Sulawesi Selatan menunjukkan perjuangan yang tidak pernah padam dalam menghadapi dominasi kekuatan Belanda. Mereka menginginkan Sulawesi Selatan bergabung kembali ke Republik Indonesia, karena adanya keterikatan dengan Proklamasi Kemerdekaan di tahun 1945.

Setelah NIT dibubarkan dan Sulawesi Selatan kembali menjadi bagian dari NKRI, sisa-sisa konflik antara federalis dan republikan masih tetap ada. Elit federalis dan kelompok yang dulunya dikenal mendukung NIT masih terus dicurigai. Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat mendorong adanya konsolidasi ideologi Tunggal, agar tidak ada lagi perpecahan politik seperti di era federalisme. Manipol USDEK kemudian diperkenalkan sebagai solusi. Manipol USDEK dijadikan landasan negara dan ideologi tunggal guna mengendalikan potensi dualisme politik di Sulawesi Selatan serta berfungsi sebagai sarana “penyatuan memori kolektif”. Kursus indoktrinasi dan Manipol USDEK yang dilakukan kepada masyarakat



(Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi*

Sulawesi Selatan selanjutnya terlihat sebagai komponen dari proyek revolusi Sukarno.

2.2. Pergolakan Daerah

Pembekuan KNIL, menyerahnya Andi Azis, pelarian Soumokil ke Maluku, hingga kembalinya konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak membuat paruh terakhir tahun 1950 di Sulawesi Selatan menjadi terkendali. Jika pada masa NIT, pertentangan terjadi antara kaum republikan dan federalis, maka pada periode selanjutnya konflik yang menonjol berkisar di permasalahan suku, agama, dan aliran politik (ideologi). Di sisi lain, tuntutan atas status daerah otonom dengan provinsi tersendiri tidak dipenuhi pusat. Sulawesi Selatan hanya menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi yang memicu munculnya pertentangan-pertengangan baru di kemudian hari.

Meleburnya Sulawesi Selatan ke dalam NKRI juga diwarnai berbagai persoalan di bidang politik dan pemerintahan, diantaranya ialah pemberontakan Kahar Muzakkar yang harus dihadapi oleh Gubernur B.W Lapien selaku acting Gubernur dan Kolonel Alex Kawilarang sebagai Panglima Perang Indonesia Timur. KGSS dan Kahar Muzakkar yang termarginalkan dari hierarki Angkatan perang Indonesia memutuskan menarik diri ke hutan untuk mengamankan senjata, sembari menunggu penyelesaian sengketa terkait kebijakan personil ketentaraan. Anggota kelaskaran yang semula berharap dimasukkan ke dalam kesatuan TNI secara penuh mengingat jasa dan pengorbanan yang dilakukannya, oleh pemerintah diwajibkan melewati



“screening” terlebih dahulu.²³ Aturan tersebut bertujuan membatasi jumlah personil karena adanya pertimbangan efesiensi manajerial, finansial pemerintah dan profesionalitas. Kahar Muzakkar juga merasa tidak puas dengan pemerintah pusat yang seolah menganaktirikan perjuangan orang-orang Sulawesi Selatan. Pusat lebih mengutamakan orang-orang Jawa, Sumatera dan Minahasa dalam perekrutan tersebut dan menempatkannya pada posisi-posisi strategis. Karena tidak menemui kata sepakat, pada tanggal 7 Agustus 1953 Kahar Muzakkar akhirnya menyatakan bahwa kelompok gerilyanya berafiliasi dengan DI/TII, suatu gerakan yang mencita-citakan berdirinya negara berlandaskan syariat Islam pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Agar kaum gerilya di Sulawesi Selatan yang umumnya beragama Islam bersimpati dengan gerakannya, maka Kahar Muzakkar menggunakan persaingan kesukuan dan keagamaan serta anti komunis dalam tema perjuangannya. Keputusan tersebut menandai masa pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.

Sulawesi Selatan yang kembali masuk dalam pusara konflik merasakan penderitaan berkepanjangan. Wilayahnya seolah terbagi. Tidak berdasarkan pemerintahan administratif, tetapi lebih bersifat politis antara daerah kekuasaan Republik Indonesia yang mayoritas menguasai perkotaan dan Darul Islam yang basis pergerakannya banyak terjadi di daerah pedesaan, terutama hutan pedalaman Sulawesi Selatan. Sebelum melakukan penyerangan dan melucuti senjata-senjata Tentara



Esther Velthoen “*Memetakan Sulawesi Tahun 1950-an*”
 ita Van Bemmelen dan Remco Reben (penyunting),
aerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an, (Jakarta:
 Obor Indonesia. 2011), 197.

Republik, gerilyawan terlebih dahulu menghancurkan jembatan-jembatan dan menebang pohon-pohon untuk memblokir akses perhubungan. TNI kemudian membalasnya dengan operasi-operasi militer.

Beberapa kelompok sipil di Sulawesi Selatan tidak menyetujui operasi militer yang dilakukan oleh tentara. Mereka yakin akan ada itikad yang baik dan patriotisme dari gerilyawan. Sikap simpati terhadap kaum gerilyawan mayoritas berasal dari pedesaan, wilayah yang dijadikan pusat kekuasaan kelompok pemberontak karena diberi makan oleh gerilyawan dibandingkan Tentara Republik yang terdiri dari orang asing (luar Sulawesi Selatan).²⁴ Tersiar kabar di tengah masyarakat, jika Tentara Republiklah yang memulai pertempuran terlebih dahulu, pihak gerilyawan mundur ke hutan untuk menghindari pertumpahan darah dan terpaksa membalas serangan dari Tentara Republik.²⁵ Akibatnya hubungan tentara dan rakyat menjadi tegang.

Simpati yang diperlihatkan masyarakat Sulawesi Selatan mengisyaratkan bahwa masalah Kahar Muzakkar tidak hanya sekedar gerakan kontra terhadap aturan Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta. Lebih dari itu, sumber konfliknya terletak pada masalah kedaerahan, sikap primordialisme (suku) dan agama. Kehadiran orang-orang utara (Minahasa) di Sulawesi Selatan sejak awal 1950an, membuat gerilyawan merasa terpinggirkan di rumah sendiri. Orang Minahasa yang mayoritas beragama Kristen dan berpendidikan barat lebih diprioritaskan, ketimbang orang



C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, PT Pustaka Utama Grafiti, 1995), 160.

Dijk, *Darul Islam Sebuah*, 161.

Sulawesi Selatan yang kurang berpendidikan dan beragama Islam. Joop Warouw (Minahasa) diangkat menjadi kepala staf TT-VII/Indonesia Timur pada bulan maret 1952. Sementara kebencian terhadap Jawa dirawat dengan adanya pandangan jika Jawa pro komunis, dan mereka datang ke Sulawesi Selatan untuk menghancurkan pergerakan kaum gerilya. Tidak hanya itu, naiknya R. Soediro yang berasal dari Jawa sebagai Gubernur definitif Provinsi Sulawesi menambah sentimen masyarakat, karena sebelumnya sembilan partai politik telah mencalonkan Lanto Daeng Pasewang yang merupakan putra daerah Sulawesi Selatan.²⁶ Oleh karena itu, pemberontakan Kahar Muzakkar menjadi simbol penentangan terhadap dominasi Jawa dan Minahasa baik dalam jabatan-jabatan sipil maupun militer.

Persoalan di Sulawesi membuat Nasution berencana untuk mereorganisasi ketentaraan ke dalam komando-komando yang lebih kecil. Diagendakan pula latihan-latihan dan program-program pendidikan untuk memperlengkapi perwira-perwira dan bawahan, yang sebagian besar berasal dari eks gerilya yang diterima menjadi tentara dalam kompromi pra CTN di tahun 1952.²⁷ Rencana ini disambut baik para perwira Sulawesi Selatan yang berharap dapat lepas dari dominasi orang-orang Minahasa. Di ranah birokrasi, muncul pula wacana pemisahan utara-selatan. Pembagian provinsi ini dilakukan untuk mengabulkan tuntutan-tuntutan daerah. Akan tetapi, setiap keputusan memiliki

²⁶ Anwar Arifin, *Perpustakaan Nasional Katalog dalam (KDT) Pergulatan Politik di Makassar 1945-1966*, Pustaka irVan, (2019), 98.



Barbara Sillars Harvey, *Permesta Pemberontakan 1 Hati*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989), 47.

konsekuensi. Jika berpisah, selatan akan terputus dengan sumber penghasilannya yakni kopra di utara. Hal ini tentunya mempengaruhi perekonomian dan alokasi dana dalam menghadapi pemberontakan Kahar Muzakkar yang masih terus berlangsung.

Gejolak daerah berdampak pada terhambatnya pembangunan. Untuk mengatasinya, partai-partai politik dan berbagai kelompok sosial kemudian mengajukan solusi berupa otonomi daerah. Salah satu partai politik yang vokal menyuarakan otonomi daerah ialah Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). PKR berhasil menempati posisi kedua pada pemilu 1952 dan memiliki tokoh kader yang berpengaruh di pemerintahan.²⁸ Sama halnya dengan empat puluh tujuh organisasi pemuda yang tergabung dalam Dewan Pemuda Sulawesi. Mereka mengadakan rapat di Kota Makassar pada tanggal 3 Februari 1957 dan menyepakati bahwa penyelesaian keamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan melalui pembangunan.²⁹ Selanjutnya, PKR dan Kelompok pemuda bersatu membentuk wadah perjuangan baru bernama Konsentrasi Tenaga yang

²⁸ Tokoh-tokoh utara dan selatan sempat dipersatukan dalam satu kesatuan pada awal kemerdekaan dalam wujud PKR (Partai Kedaulatan Rakyat). Anggota-anggota PKR di Sulawesi Selatan yaitu Andi Pangerang Pettarani, Andi Burhanuddin, Lanto Daeng Passewang dan Henk Wondonuw. Lihat Anwar Arifin, *Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Pergulatan Makassar 1945-1966*, 101.



R.Z. Leirissa. *PRRI PERMESTA Strategi Membangun a Tanpa Komunis*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti,).

tujuannya untuk keselamatan rakyat Sulawesi yang sedang menghadapi berbagai permasalahan pelik.

Kondisi politik dan administrasi yang labil meyakinkan Letkol HNV Samual selaku Komandan TT VII Indonesia Timur bahwa integrasi wilayah Sulawesi ke NKRI belum matang, sehingga ia menyatakan seluruh wilayah dalam keadaan darurat perang (SOB), serta berlakunya pemerintahan militer pada tanggal 2 Maret 1957. Pernyataan ini didukung oleh lima puluh satu orang yang terdiri dari para pejabat dan tokoh-tokoh militer, diantaranya Andi Pangerang Pettarani (Gubernur) dan Letkol Saleh Lahade. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan gerakan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta). Timbulnya Permesta yang menuntut otonomi daerah dan menyuarakan sikap anti komunis menambah deret panjang persoalan daerah di Sulawesi Selatan.

Gerakan Permesta secara umum dimaknai sebagai krisis militer, sehingga penyelesaiannya diinisiasi oleh Nasution selaku pimpinan KSAD. Solusi tersebut berupa, pertama Presiden Sukarno diminta untuk mensahkan status negara dalam keadaan bahaya dan perang secara nasional mulai tanggal 14 Maret 1957. Kedua, TNI mereorganisasi daerah militer Indonesia Timur menjadi empat teritorial yaitu Sulawesi Selatan dan Tenggara, Sulawesi Utara dan Tengah, Irian Barat dan Nusa Tenggara. Ketiga, Andi Pangerang Pettarani ditunjuk sebagai gubernur militer Sulawesi Selatan dan Tenggara mulai 1 April 1957.³⁰ Pengangkatan Andi Pangerang Pettarani sesungguhnya adalah taktik Nasution agar kesetiaan pemimpin-pemimpin daerah tetap

terpusat pada pusat. Dengan demikian, perpecahan di tubuh tidak terelakkan. Praktis, gerakan politik Permesta di

Harvey, *Permesta Pemberontakan Setengah*, 81.



Sulawesi Selatan menurun drastis. Situasi yang tidak menguntungkan di Sulawesi Selatan ini memaksa Letkol HNV Samuel bergeser ke Sulawesi Utara pada bulan Juni 1957 dan selanjutnya memilih berjuang bersama P.R.R.I di Sumatera.

Pada dasarnya perpecahan Permesta bersumber dari perbedaan cara pandang dua poros utama yakni Letkol. M. Jusuf dan Andi Pangerang Pettarani dengan Letkol HNV Samuel dan Saleh Lahade. Letkol. M. Jusuf menyadari jika yang dibutuhkan para tentara di Sulawesi Selatan yakni program latihan dan pendidikan, serta pembangunan organisasi kemiliteran yang akan membantu mereka meredam pemberontakan Kahar Muzakkar. Senada dengan itu, Andi Pangerang Pettarani menilai bahwa persoalan-persoalan daerah tengah diusahakan mendapatkan solusi dari pusat, maka sepatutnya menunggu arahan pusat. Sedangkan Letkol HNV Samuel sangat tidak menyetujui keputusan Nasution yang menghapus komando tempat ia memegang kedudukan resmi, tanpa memberikan pengakuan kepada pemerintahan Permesta yang telah dideklarasikan. Keretakan para tokoh Permesta semakin melemahkan inti gerakannya di Sulawesi Selatan, hingga benar-benar ditundukkan pada tahun 1960.

Pengangkatan Letkol. M. Jusuf sebagai Panglima XIV Hasanuddin pada tahun 1959 dan pembagian Sulawesi menjadi dua provinsi yang berbeda di tahun 1960 memberikan pengaruh signifikan di Sulawesi Selatan. Kebijakan yang mengakomodasi kepentingan putra daerah ini berimbas terhadap gerakan-gerakan kontra pemerintah pusat. Pemberontakan pimpinan Muzakkar mulai terbuka untuk berunding dengan militer, menganggap akan mendapatkan titik temu jika



bernegosiasi dengan sesama orang Sulawesi Selatan.³¹ Di sisi lain, wacana perundingan juga menunjukkan sinyalemen kemunduran gerakan pemberontak. Lemahnya Kahar Muzakkar disebabkan oleh konflik internal dalam DI/TII. Berangsur-angsur pasukan CTN yang dulunya dipimpin oleh Kahar Muzakkar berhasil diresmikan menjadi anggota APRI. Begitu pula dengan beberapa tokoh penting beserta pasukannya yang selama ini menjadi tangan Kahar Muzakkar, memilih bergabung dengan pemerintah setelah dijanjikan posisi komandan batalyon dan diberikan keleluasaan menguasai sumber-sumber ekonomi beberapa daerah Sulawesi Selatan.³² Mulai dari Andi Selle pada tahun 1951,³³ Andi Sose di tahun 1952, hingga Bahar Mattaliu yang resmi meninggalkan Kahar Muzakkar pada tahun 1959 dengan menyerahkan sebanyak 2056 senjata kepada TNI.³⁴ Daerah penghasil logistik dan senjata yang jatuh ke TNI sejak awal tahun 1960an ditambah operasi-operasi militer yang tetap berlangsung, memperburuk kondisi DI/TII Kahar Muzakkar dan pada akhirnya benar-benar menyerah pada tahun 1965.

³¹ Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar*, 318.

³² Andi Selle mengontrol perdagangan kopra dari Mandar, Pare-pare dan Pinrang. Sedangkan Andi Sose menguasai kopra di wilayah di pare-pare, hasil-hasil hutan di Tanah Toraja, dan beras di Wajo.

³³ Sulewo Hadiwijoyo, *Kahar Muzakkar dan Kartosuwiryo atau Pemberontak?!*, (Jakarta: Palapa, 2013), 74-80.

Ahamd Subair, Tesis: *Jaringan Perdagangan Senjata sa Gerakan DI/TII Sulawesi Selatan Tahun 1950-1965*, ar, Universitas Negeri Makassar, 2018), 102.



Pergolakan daerah di Sulawesi Selatan sepanjang 1950-an hingga awal 1960-an meninggalkan luka mendalam dalam relasi pusat dan daerah. Pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar dan keterlibatan sebagian perwira Sulawesi Selatan dalam gerakan Permesta menunjukkan betapa rapuhnya legitimasi pemerintah pusat di mata masyarakat daerah. Rakyat di pedesaan banyak yang bersimpati pada gerilya, sementara aparat negara sering dipandang sebagai kekuatan luar yang memaksakan kekuasaan tanpa menghiraukan aspirasi lokal. Kondisi inilah yang membuat Sulawesi Selatan menjadi ruang rawan bagi fragmentasi politik dan ancaman disintegrasi. Dalam situasi tersebut, keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan penetapan Manipol USDEK sebagai haluan negara menjadi titik balik penting. Pemerintah pusat tidak hanya menggunakan kekuatan militer untuk menumpas pemberontakan, tetapi juga meluncurkan proyek indoktrinasi ideologi. Manipol USDEK diposisikan sebagai simbol kesatuan nasional, jalan revolusi yang sah, sekaligus penangkal terhadap narasi politik daerah yang berpotensi memecah belah bangsa.

Indoktrinasi Manipol USDEK dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak sebagai upaya untuk merebut hati masyarakat Sulawesi Selatan, yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh gerakan separatis lokal. Pada konteks ini, indoktrinasi Manipol USDEK memiliki dua fungsi. Di satu sisi, ia mendiskreditkan gerakan daerah dengan menyebutnya sebagai anti-revolusi dan pro-imperialis. Sebaliknya, ia memberikan cerita



ngenai rasa kebangsaan, persatuan, dan kepemimpinan sebagai lambang revolusi. Melalui partisipasi tokoh seperti M. Jusuf dan Andi Pangerang Pettarani, negara

berusaha menegaskan bahwa Sulawesi Selatan bukanlah penentang, melainkan bagian yang penting dari kelompok nasional untuk menyelesaikan revolusi.

Secara perlahan, strategi ini berhasil menurunkan dukungan masyarakat terhadap pemberontakan daerah. Masyarakat mulai menganggap TNI dan pemerintah pusat sebagai penjaga revolusi, bukan hanya sebagai kekuatan penindas. Meskipun ketegangan tidak sepenuhnya mereda hingga pertengahan 1960-an, indoktrinasi Manipol USDEK berkontribusi memperkecil ruang legitimasi moral terhadap DI/TII dan Permesta, serta memperkuat posisi pemerintah pusat di Sulawesi Selatan. Pada tahap ini, indoktrinasi Manipol USDEK di Sulawesi Selatan bukan sekadar program kursus dalam rangka pendidikan politik semata, melainkan bagian dari strategi ideologis yang dirancang untuk meredakan gejolak daerah, mengintegrasikan masyarakat ke dalam bingkai NKRI, serta memperkuat hegemoni Presiden Sukarno.

2.3. Kontestasi Politik pada Pemilu 1955

Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki semangat baru dalam kehidupan berpolitik. Mereka larut dalam kontestasi politik yang sedang menghangat, diantaranya ialah pemilu. Euphoria pemilu tentu tidak hanya terjadi di wilayah ini saja, melainkan juga disambut dengan gegap gempita oleh seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Antusias yang tinggi tidak



akan, sebab sejak Januari 1946 pemilu telah digadangkan dilaksanakan. Akan tetapi, keinginan tersebut karena masyarakat terlebih dahulu harus berkonsentrasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ambisi

kembalinya kaum imperialisme. Masa revolusi menjadi ajang “duel” fisik dan non fisik kedua belah pihak yang bertentangan. Energi, perhatian, materi dan kekuatan seluruh masyarakat Indonesia dari lapisan terbawah hingga pucuk pemerintahan berkonsentrasi upaya mempertahankan kemerdekaan.

Momentum pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda di tahun 1950, membuat pemerintah secara perlahan-lahan mulai menata ulang sistem pemerintahan, termasuk kembali mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang sempat tertunda. Sejak kabinet Natsir, Rancangan Undang-Undang Pemilu mulai diajukan ke dewan legislatif. Meskipun demikian, penyelenggaraan pemilu secara nasional akhirnya terselenggara di masa kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Salah satu wilayah yang juga turut serta dalam pemilu pertama ini yakni Sulawesi Selatan, yang saat bersamaan tengah menghadapi berbagai masalah pemberontakan dan ekonomi. Realita ini membuat masa-masa persiapan hingga pelaksanaan pemilu terlaksana dengan sangat dinamis dan penuh tantangan.

Sebelum penyelenggaraan pemilu nasional 1955, Kota Makassar telah melaksanakan pemilihan anggota DPRD terlebih dahulu. Pemilu ini sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Acting Gubernur Provinsi Sulawesi No. 225 tertanggal 9 Mei 1951 mengenai pemilihan darurat di wilayah Kotapraja Makassar. Keputusan tersebut ditempuh guna mengganti anggota DPRD dan DPD yang telah dibekukan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tanggal 6



1952 berlangsung pemilihan umum dan akhirnya <an 25 orang terpilih sebagai anggota DPRD Kota r. Penyelenggaraan pemilu pertama ini mengalami

rentetan persoalan, terutama pada rendahnya partisipasi masyarakat. Hanya sekitar 34% masyarakat yang menggunakan hak suaranya, sehingga pemilu ini dianggap tidaklah representatif.³⁵ Faktor yang membuat rendahnya partisipasi masyarakat pada pemilu 1952 yakni keamanan yang tidak terjamin, kesadaran bernegara yang belum terbangun dengan baik, akibat masih adanya sisa-sisa pertentangan antara kaum federalis dan republikan. Sikap apatis masyarakat juga dipengaruhi oleh adanya rasa pesimis masyarakat terhadap anggota legislatif yang terpilih. Kinerja para dewan tersebut sering dipertanyakan dan sering dianggap tidak mampu menyuarakan aspirasi konstituennya.³⁶ Meskipun demikian, pemilu tahun 1952 tetaplah penting dan dapat dijadikan sebagai ajang persiapan menuju pemilu skala nasional yang lebih matang, serta bahan pertimbangan kepada partai-partai politik yang akan berlaga dalam menerapkan strategi untuk memperoleh kemenangan.

Mendekati masa penyelenggaraan pemilu nasional di tahun 1955, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua daerah pemilihan yakni daerah pemilihan Sulawesi Utara-Tengah dan Sulawesi Selatan-Tenggara. Khusus Sulawesi Selatan Tenggara menjadi dapil ke XII dari total XV dapil yang terbentuk. Selama masa persiapan pemilu, Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang cukup sulit. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu terkendala jarak tempuh yang jauh antar setiap wilayah,

³⁵ Idwar Anwar, *Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan/Tenggara: Suara di Daerah Konflik-Strategi dan Pertarungan Partai-Partai Politik*, (Makassar: Pustaka Sawerigading,



anwar, *Pemilu 1955 di*, 62.

menyebabkan surat panggilan tidak maksimal diterima oleh pemilih.³⁷ Selain itu, tingginya angka buta huruf dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap bahasa Indonesia menjadi tantangan yang dihadapi oleh pihak panitia dalam mensosialisasikan pemilu. Selanjutnya, konflik antar masyarakat yang terus memanas, terutama terkait gerombolan dan pemberontakan Kahar Muzakkar yang mengganggu keamanan, membuat panitia penyelenggara harus bekerja lebih ekstra lagi. Serangan yang terjadi mengakibatkan banyak alat-alat pemilu dan senjata polisi yang hilang ataupun rusak. Kekacauan ini juga berakibat fatal dengan gugurnya beberapa anggota polisi dan panitia penyelenggara pemilu.

Kondisi yang tidak kondusif di daerah pemilihan XII Sulawesi Selatan membuat banyak pihak pesimis akan penyelenggaraan pemilu yang berjalan lancar. Namun, pemilu tetaplah harus berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tanggal 29 September 1955, masyarakat berbondong-bondong datang ke bilik suara untuk memilih anggota DPRD. Akan tetapi, hanya *Afedeling* Pare-Pare dan Kota Besar Makassar yang berhasil melakukan pemilu secara serentak, selebihnya terpaksa mengalami penundaan dan harus dijadwalkan ulang. Penjadwalan pemilu ulang dilakukan hingga pertengahan bulan November 1955, karena suasana yang tidak mendukung untuk pelaksanaan pemilu.³⁸ Panitia harus berjibaku

³⁷ *Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi 1946-1960*. 401 Tentang "Surat-surat tahun 1955-1956 tentang i Umum Konstituante", (Makassar: Badan Arsip dan kaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015).



Inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi 1946-1960. 401 Tentang "Surat-surat tahun 1955-1956 tentang

dengan banyaknya gangguan, seperti pembakaran dan penyerangan beberapa TPS secara massif, pengerusakan serta perampokan atribut pemilu. Masyarakat juga menerima ancaman-ancaman untuk tidak terlibat dalam pemilu. Bahkan, terjadi aksi penculikan hingga pembunuhan petugas penyelenggara dengan sadis.³⁹ Peristiwa tersebut tentu mempengaruhi kinerja petugas. Teror-teror yang dilakukan oleh pemberontak mengintimidasi panitia pemilu. Sebagaimana yang terjadi kepada para kepala Muslang (Kepala Kampung Pallambejang), Dahong (Kepala Kampung Kalibara), Makkasau (Kepala Kampung Kassiloe) dan Abd Sapa (Wakil Kepala Kampung Kanaungan). Mereka didatangi oleh gerombolan sebanyak 20 orang yang dilengkapi dengan senjata 1 Stengun dan 2 bedil dan kemudian menculik Abd Sapa serta Makkasau.⁴⁰ Sementara itu, di kalangan masyarakat muncul kebingungan, apakah mereka tetap ikut pemilu atau membiarkan pemilu berlalu begitu saja demi keamanan mereka. Bagi masyarakat simpatisan DI/TII, berkembang persepsi bahwa

Pemilihan Umum Konstituante”, (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015).

³⁹ Ancaman berupa dan penjarahan rumah-rumah bagi masyarakat yang meninggalkan kediamannya untuk melakukan pemilu. Jarak tempat pemilihan yang cukup jauh memberikan kesempatan kepada gerombolan untuk leluasa melancarkan aksinya tersebut. Gerombolan juga menyatakan barang siapa yang mengikuti pemilu akan dianggap musuh terang-terangan oleh Pemerintah Militer Republik Islam Indonesia Propinsi Sulawesi.



inventaris Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi 1946-1960
 . 401 Tentang “Surat-surat tahun 1955-1956 tentang
 1 Umum Konstituante”, (Makassar: Badan Arsip dan
 kaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015).

memboikot pemilu berarti turut andil dalam menggagalkan program nasional, yang dinilai sebagai salah satu cara pemerintah pusat menguatkan cengkramannya di daerah.

Melihat realitas di lapangan, pihak penyelenggara dan masyarakat pro pemilu meresponnya dengan sigap dan tetap berhati-hati. Masyarakat berupaya tidak terpengaruh oleh banyaknya ancaman yang mereka terima. Masyarakat melawan dengan menunjukkan antusiasmenya dan terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu, seolah menerima “tantangan” para pembenrontak yang mengancam. Jalur yang lebih resmi dilakukan oleh beberapa partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Mereka meminta bantuan kepada pemerintah pusat guna mengawal dan mengamankan proses persiapan sampai penyelenggaraan pemilu 1955, terutama karena di waktu yang bersamaan Sulawesi Selatan termasuk dalam keadaan darurat atau *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB), dimana pemimpin militer juga sekaligus berstatus sebagai pemimpin masyarakat sipil. Pihak militer mengambil langkah taktis dengan membentuk Kesatuan-Komando yang berkedudukan di Markas Corps Polisi Militer Kompi-75 jalan Ammana Gappa No.17 Makassar dalam rangka mengamankan proses pemilu.⁴¹ Segala hal yang berkaitan dengan persoalan pemilu di Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi otoritas dari kesatuan ini, sehingga masyarakat diharapkan merasa lebih tenang dalam menghadapi konstelasi politik dan gangguan keamanan. Pihak angkatan perang juga



Inventory Arsip (Rahasia) Propinsi Sulawesi 1946-1960
 . 400 Tentang “Surat Tahun 1955 tentang Pemilihan
 (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi
 Selatan, 2015).

melancarkan operasi-operasi pengamanan untuk menindak tegas gerombolan pengacau dengan menghancurkan markas, pengamanan senjata, penangkapan, sampai kontak senjata yang menelan korban jiwa.

Menjelang pemilu, tensi panas dan suasana menegangkan tidak hanya terjadi di ranah keamanan saja, namun semakin kental terasa pada dinamika politik itu sendiri. Hal ini terlihat dari suguhan kampanye yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat dengan bebas menyaksikan pertarungan politik secara terbuka. Perdebatan sering terjadi antara partai pendukung pemerintah dan pihak oposisi terkait kebijakan pemerintah dan azas negara yang masih menjadi polemik. Adanya hal tersebut membuat kampanye menjelang pemilu menjadi ajang kompetisi ideologi. Partai politik yang berlaga selain bertujuan meraup suara sebanyak-banyaknya, juga memiliki misi lain yakni mentransmisikan ideologi yang mereka anut kepada masyarakat umum. Terlebih, Dewan Konstituante yang menjadi elemen yang akan dipilih memang bertugas merumuskan dasar negara yang baru.

Masa kampanye dimaksimalkan oleh partai politik dan memunculkan blok-blok berdasarkan aliran ideologi yang dianut.⁴² Blok pertama diisi oleh partai politik berideologi agama seperti Masyumi, NU dan Parkindo. Kedua ialah blok nasionalisme yang diwakilkan oleh PNI dan PKR. Sedangkan blok komunis/sosisalisme digawangi oleh PKI. Saling serang dan sindir dengan mudah ditemui. Masyumi acap kali menuding barisan



Inventory Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi 1950-1960
235 Tentang "Berkas mengenai Masalah Pemilu Tahun 1953-1955", (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Sulawesi Selatan, 2015).

nasionalisme, terutama PNI sebagai kelompok yang banyak melakukan penyelewangan karena kadernya yang banyak terjerat kasus korupsi di tataran pusat. Dikemukakan bahwa orang-orang PNI itu tukang korupsi pencuri di siang bolong, dan Menteri-Menterinya pada Kabinet Alisastroamidjojo telah ditahan karena telah melakukan agitasi untuk mempengaruhi massa, serta tidak berkompeten dalam mengurus perekonomian negara. Akibatnya, masyarakatlah yang harus menanggung penderitaannya karena harga-harga barang yang semakin melambung tinggi. Lambang PNI berupa banteng, oleh Masyumi ditafsirkan sebagai upaya partai tersebut untuk menanduk masyarakat. Seolah sekali mendayung, dua pulau terlampaui, Masyumi juga menuding jika PNI dan PKI tidaklah jauh berbeda. Keduanya terbukti banyak mengkhianati janji-janjinya terhadap masyarakat. Terlebih kaum komunis yang identik dengan kelompok yang tidak mengenal Tuhan, tidak bermoral dan menganalogikan simbol palu arit sebagai alat untuk menyiksa manusia. Tidak tinggal diam, PKI membalasnya dengan menyebut jika Masyumi mendukung pemberontakan DI/TII, karena mengusung nilai yang sama yakni keislaman di tengah masyarakat.

Terlepas dari kekacauan yang tengah mendera, pemilu 1955 di Sulawesi Selatan tetap semarak dengan para peserta pemilu yang cukup menjanjikan dari segi jumlah partisipan. Pada tingkat DPRD, masyarakat memiliki 33 pilihan yang terdiri atas 13 partai politik, 13 organisasi massa dan 8 melalui jalur perseorangan/perkumpulan.⁴³ Untuk Dewan Konstituante yang



Terlepas dari kekacauan yang tengah mendera, pemilu 1955 di Sulawesi Selatan tetap semarak dengan para peserta pemilu yang cukup menjanjikan dari segi jumlah partisipan. Pada tingkat DPRD, masyarakat memiliki 33 pilihan yang terdiri atas 13 partai politik, 13 organisasi massa dan 8 melalui jalur perseorangan/perkumpulan.⁴³ Untuk Dewan Konstituante yang

berlaga pada tanggal 15 Desember 1955, opsinya juga beragam yang totalnya mencapai 32 peserta.⁴⁴ Sebelum pemilu Dewan Konstituante, dinamika politik sempat memanas. Di masyarakat

(PKR), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Biro BPRI, Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia, BW Lapien dkk, Persatuan Indonesia Raya (PIR), Gerakan Pembela Pantjasila, Badan Perdjooangan Buruh (BPB), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Baperki, Murba Pembela Proklamasi, Partai Katolik, dan beberapa peserta yang bernuansa kedaerahan seperti Persatuan Kemakmuran Indonesia Sulawesi (Perkis), P.R.I Kemanusiaan, Komite Pemilihan Lasinrang, Persatuan Kepala Lampung Sulawesi Selatan (PKKSS). Sementara itu, untuk peserta atas dasar perseorangan/perkumpulan ialah Hadji Abd Rachman Ambo Dalle dkk, Amirullah Andi Mangga, La Ode M. Idrus Effendi dkk, Hadji Darwis Zakaria dkk, Hadji Makkaraeng Dg Djarung, W.G.J. Kaligis dkk dan La Ode Hadi. Lihat Anwar, *Pemilu 1955 di*, 131.

⁴⁴ Peserta pemilu untuk Dewan Konstituante adalah Biro Perjuangan Pembangunan Republik Indonesia, Partai Rakyat Indonesia, Persatuan Kemakmuran Indonesia Sulawesi (Perkis), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Gerakan Pembela Pancasila, Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Sosialis Indonesia, B. W. Lapien dkk, Murba Pembela Proklamasi, Partal Buruh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Buruh Tani, Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Masjumi, Partai Rakyat Nasional (PRN), Persatuan Indonesia Raya (PIR), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Pusat Penggerak Pencalonan Laode M. Idrus Effendi, Persatuan Kepala Kampung Sulawesi Selatan (PKSS), Ambo Tjatha Dg. Magassing, Komite Pemeliohan Lasinrang, Persatuan Indonesia Raya (PIR), W.G.J. k, Haji Abd. Rachman Ambo Dalle dkk, La Ode Hadi, Haji Zakaria dkk, Amirullah Andi Mangga, dan Haji ang Daeng Raja. Lihat Anwar, *Pemilu 1955 di*, 132).



tersebar selebaran yang menunjukkan seolah terjadi pertentangan antara dua partai berideologi Islam Masyumi dan NU. Selebaran tersebut dicuigai sebagai propaganda untuk memecah suara umat Islam dan mempertajam perbedaan kedua partai tersebut. Isi pokok selebaran tersebut ialah pokok-pokok pikiran antara NU dan Masyumi, yang di satu pihak mengharamkan orang-orang yang keluar dari madzhab empat imam (Syafii, Hanafi, hambali dan Maliki). Sedangkan pihak lainnya, yakni NU membolehkan umat Islam yang ingin keluar dari madzab-madzhab tersebut.

Menjelang petang di hari pemilu, proses penghitungan suara mulai dilakukan. Setiap surat suara dicek keabsahannya oleh petugas dan para saksi. Tahun 1955 sebagai debut pemilu nasional ternyata mampu meningkatkan partisipasi masyarakat Sulawesi Selatan-Tenggara sebesar 66%. Dua kali lipat dibandingkan pada pemilu 1952. Sementara untuk pemilihan Dewan Konstituante berada pada kisaran 75%. Dengan total jumlah pemilih sebanyak 1.630.936 orang.⁴⁵ Hal ini membuktikan jika kinerja petugas untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu cukup efektif. Masyarakat dengan berbagai kendala berusaha memaksimalkan kesempatan yang mereka miliki untuk sebuah perubahan yang lebih baik kedepannya. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan XIV daerah pemilihan lainnya di Indonesia, jumlah pemilih Sulawesi Selatan Tenggara termasuk yang terendah.

Hasil pemilu Sulawesi Selatan-Tenggara tahap pertama memilih anggota DPRD menempatkan Masyumi sebagai



anwar, *Pemilu 1955 di*, 169.

partai pemenang, disusul oleh partai Islam lainnya yakni NU. Diurutan selanjutnya ditempati oleh Parkindo, partai politik yang juga mengusung ideologi keagamaan kristiani. Sedangkan untuk tahap kedua dalam rangka memilih anggota Dewan Konstituante juga tidak berbeda jauh, Masyumi, NU, dan Parkindo tetap berurutan. Hanya saja peroleh suara ketiganya mengalami peningkatan karena tingkat partisipasi masyarakat pada tanggal 15 Desember 1955 juga lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya.

Posisi tiga besar dalam pemilu Sulawesi Selatan-Tenggara tidak sekedar kalkulasi perhitungan suara semata, namun di dalamnya termaktub makna yang lebih mendalam terkait peta politik dan realitas ideologi Sulawesi Selatan-Tenggara. Terbukti bahwa partai yang mengusung ideologi keagamaan khususnya Islam mendapatkan dukungan lebih besar, jika dibandingkan dengan ideologi lainnya seperti nasional atau komunis. Dominasi partai Islam ini memperlihatkan bahwa basis sosial masyarakat Sulawesi Selatan pada dekade 1950-an cenderung condong pada politik Islam, baik dalam bentuk modernis (Masyumi) maupun tradisional (NU). Hal inilah yang membuat pergolakan daerah yang mengatasnamakan agama mudah tersulut.

Kemenangan Masyumi dan NU dalam Pemilu 1955, bagaimanapun, menimbulkan kekhawatiran di tingkat pusat. Sukarno menilai bahwa fragmentasi politik berbasis ideologi dan agama berpotensi melemahkan persatuan bangsa. Konteks kemenangan partai Islam inilah yang kemudian menjadi latar bagi

pusat di masa Demokrasi Terpimpin. Ketika Sukarno arkan Dekrit 5 Juli 1959 dan menetapkan Manipol sebagai haluan negara, tindakan itu tidak sekedar



langkah tata negara. Hal tersebut merupakan respons politik strategis terhadap kontestasi yang terbentuk selama pemilu. Pemerintah pusat menghadapi dua kekhawatiran. Pertama, kekuatan partai Islam yang terbukti elektoral dapat menjadi basis legitimasi alternatif bagi oposisi terhadap kebijakan pusat.⁴⁶ Kedua, keterkaitan sebagian unsur gerakan daerah dengan jaringan politik Islam memberi kemungkinan rekondisi gerakan separatis menjadi oposisi terorganisir. Kekhawatiran ini semakin diperparah oleh keterkaitan sebagian tokoh Masyumi dengan gerakan daerah, khususnya simpati terhadap pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Untuk menutup celah ini, negara menjalankan program indoktrinasi ideologis yang agresif dan multidimensi. Di saat yang bersamaan, Dewan Konstituante gagal menghasilkan konsensus tentang dasar negara, Sukarno mengambil langkah drastis dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan menetapkan Manipol USDEK sebagai haluan negara yang wajib dianut. Penetapan Manipol USDEK segera diikuti dengan program indoktrinasi masif di seluruh daerah, termasuk Sulawesi Selatan. Tujuannya jelas yakni menggantikan legitimasi yang sebelumnya dimenangkan partai-partai Islam melalui Pemilu 1955, dengan legitimasi baru yang berpusat pada Sukarno dan ideologi negara.

Pada saat Presiden Sukarno menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin, beberapa partai politik, anggota parlemen dan Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 dibatalkan dan diganti/*diretool* dengan DPRGR, hasil penunjukan langsung



haerul Amri, Tesis: *Kejayaan hingga Kemerosotan Panji*
atang: Sejarah Partai Masyumi di Sulawesi Selatan Tahun
 (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2024), 179.

Presiden Sukarno. Demikian juga dengan nasib Masyumi sebagai partai pemenang pemilu di Sulawesi Selatan yang tidak lagi bertaji. Bagi Masyumi, yang sebelumnya menjadi pemenang Pemilu 1955, Manipol USDEK menjadi titik akhir eksistensinya. Masyumi harus menelan pil pahit pembubaran partai pada tahun 1960.⁴⁷ Berakhirnya riwayat partai Masyumi membuat basis sosial Islam modernis di Sulawesi Selatan kehilangan saluran politik formalnya.

Sejak Demokrasi Terpimpin bergulir, golongan politik yang mampu bertahan hanyalah partai politik dan orang-orang yang patuh terhadap penguasa. Partai politik seolah berada di situasi terjepit. Tidak ada pilihan lain selain mengikuti kebijakan pusat jika tetap ingin eksis. Hal ini tampak yang dialami oleh NU. Meskipun dikenal sebagai partai Islam konservatis, namun untuk menyelamatkan elektabilitasnya, NU mengambil langkah yang lebih pragmatis. NU berusaha menyesuaikan diri dengan Manipol USDEK dan memilih bekerja sama dengan kebijakan pusat.⁴⁸ Oleh karena itu, NU tetap bertahan dan menjadi bagian dari blok hegemonik Presiden Sukarno. Semakin jelas tatkala Manipol USDEK disahkan dan menjelma sebagai instrumen hegemoni negara yang tidak saja berfungsi sebagai ideologi resmi, akan tetapi mampu mengubah orientasi politik masyarakat dari kesetiaan kepada partai Islam menuju kesetiaan tunggal pada Sukarno dan revolusi. Electoral partai Islam yang tinggi pada

⁴⁷ Amri, *Kejayaan hingga Kemerosotan*, 185.



Ardi Tri Yuwono dan Mustafa Basara, "Faktor Pendorong Ulama dalam Mengadopsi Konsep Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno 1959-1965", *NAHNU: Jurnal Nahdatul dan Contemporary Islamic Studies*, Volume 2 No. 2 (2024):

pemilu 1955 seolah tidak dapat berbuat banyak dengan adanya dominasi gagasan Presiden Sukarno yang merambah hingga ke daerah.



Optimized using
trial version
www.balesio.com